LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LUWU TIMUR

2025

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Luwu Timur dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Laporan kinerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 ini cakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.

Kami melaporkan pengukuran kinerja Tahun 2024 dari 6 program yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur Telah mencapai 97,63 dari target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2024 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Kedepan,Kami akan melakukan Berbagi perbaikan untuk dapat mencapai kinerja yang memuaskan.

Malili, 25 Februari 2025

PLT.KEPALA DPM-PTSP,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si
NIP. 19690126 199803 1 004
Pangkat: Pembina Tk.I/ IV-b

DAFTAR ISI

Perihal	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1. 2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Kondisi Pegawai	4
1.5 Sistematika Penyajian	7
1.6 Isu-isu Strategis/Permasalahan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
2.1 Rencana Strategis	9
a. Tujuan dan sasaran	9
b. Indikator Kinerja Utama	10
2.2 Alokasi Anggaran	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan (good governance), diharapkan adanya transparasi dalam pengelolaan keuangan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan teratur, sehingga penyelengaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab (akuntabel) serta diharapkan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dan dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan instruksi priseden republic Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dang fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Laporan ini disusun dengan pedoman pada peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Timur pemerintah Kabupaten luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur terletak dikompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 bulan.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian rencana Aksi Tahun 2024 kepada pada stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.2 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

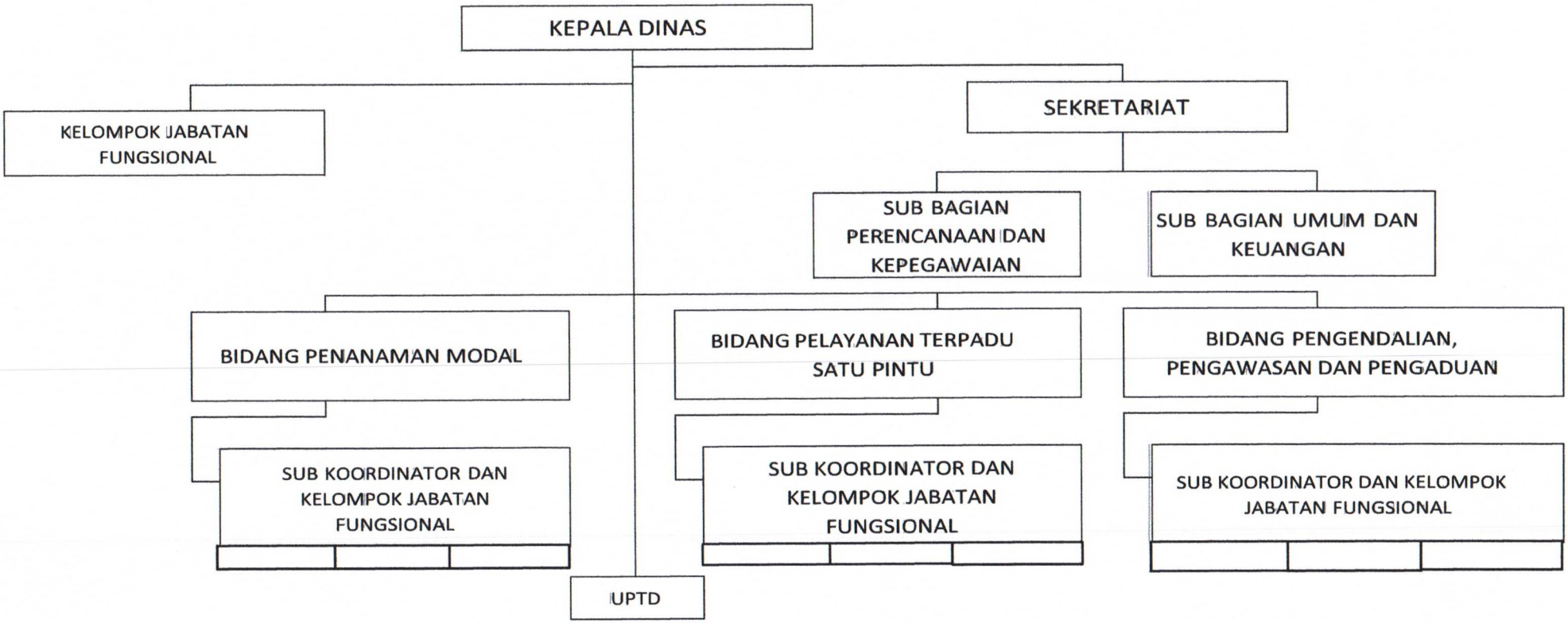

1.3 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan PERDA tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah,

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dibidang pelayanan terpadu satu pintu, dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.
- Pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon II) dan terdiri atas:

- Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Umum dan Keuangan;
  2. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- Bidang Penanaman Modal
  1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan
  1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

1.4 Isu Strategis :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dibidang pelayanan terpadu satu pintu, dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya 2 sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu "Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha (S5) serta Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik (S9)". Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum Optimalnya Promosi Potensi Investasi Daerah;
2. Belum sempurnanya Regulasi daerah dalam perbaikan Iklim Investasi;
3. Belum tersedianya data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengawasan terhadap PMA/PMDN;
5. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Informasi secara terpadu;

1.5 Keadaan Pegawai :

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab LuwuTimur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang yaitu terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil : 19 Orang
- P3K : 1 Orang
- Tenaga Upah Jasa : 22 Orang

Komposisi pegawai dan upah jasa menurut data terakhir pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Jumlah Pegawai dan upahjasa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No.	Unit /Bidang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	2	6	-	8	1	17
2	Bidang Penanaman Modal	-	1	-	2	2	5
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	6	-	3	4	13
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	2	1	4	-	7
TOTAL		2	14	1	17	7	42

Tabel. 2
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	IV	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
2	III	3	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	7
3	II	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5	PPPK	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
6	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
7	Upah Jasa	-	-	1	10	-	-	4	5	0	0	1	1	6	16
Total		4	2	5	16	-	1	6	6	-	-	1	1	16	26

Tabel 3
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	II-a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	II-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III-a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III-b	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
5	IV-a	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	IV-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

1.6 Isu-isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan pelayanan public yang transparan, cepat, objektif dan professional serta meningkatnya persaingan inovasi pelayanan .
2. Perlunya penyebarluasan informasi layanan, Inovasi, Peraturan baru dan Sistem Informasi Pelayanan.
3. Perlunya promosi keunggulan Kompetitf dan potensi peluang investasi guna menarik calon investor.
4. Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMKM sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha.
5. Perlunya memelihara Pelaku Usaha yang sudah ada, mengetahui permasalahan pelaku usaha dan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
6. Perlunya upaya jemput bola guna fasilitasi calon investor yang akan masuk maupun penyelesaian permasalahan usahanya.
7. Perlunya penyelesaian aduan secara cepat dan proporsional.
8. Perlunya Pelaku Usaha agar dapat memenuhi hak dan kewajiban serta mentaati peraturan terkait dengan kegiatan usahanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

2.1 Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dokumen Renstra DPMPTSP 2021-2026 mengacu kepada RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

"Kabupaten Luwu Timur Yang Bekelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

Misi Ke-2 RPJMD :

"Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas"

Misi Ke-4 RPJMD :

"Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik"

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan
2. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

TABEL 4.

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	Meningkatnya Nilai Realiasasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3 T	3,3 T	3,5 T	3,8 T	3,9 T	4 T
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Persentase waktu penyelesaian perizinan usaha	70.00	72.00	75.00	95.00	96.00	97.00
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP hasil evaluasi Inspektorat	71.00 (BB)	71.30 (BB)	72.50 (BB)	73.00 (BB)	73.50 (BB)	74.00 (BB)

TABEL 5.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 – 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	Triliun	3 T	3,3 T	3,5 T	3,8 T	3,9 T	4 T
	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun	2,3 T	2,5 T	2,65 T	2,9 T	2,95 T	3 T
	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Milyar	700 M	800 M	850 M	900 M	950 M	1 T
2.	Persentase Waktu penyelesaian perizinan usaha	%	70.00	72.00	75.00	95.00	96.00	97.00

2.2 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 6 program, 14 Kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran belanja Pegawai sebesar Rp. 3.063.934.883, Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.804.186.615,- dan Belanja Modal Rp 41.000.000,-. Penetapan out put dan out come ada pada masing-masing kegiatan.

Adapun anggaran per program untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.

Program dan Pagu Anggaran DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8	24	4.032.749.378
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	2	297.398.760
3	Promosi Penanaman Modal	1	2	742.131.970
4	Pelayanan Penanaman Modal	1	2	340.309.450
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	3	472.532.000
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	1	24.000.000
Total				**5.909.121.498**

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang memuat target indicator utama/ sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain Adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel. 6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET
1	**Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah (S1)**	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	1.600.000 (Juta Rupiah)
		Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	700.000 (Juta Rupiah)
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (S3)**	Persentase Waktu Penyelesaian Perizinan Usaha	95,00
3	**Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (S2)**	Nilai SAKIP hasil Evaluasi Inspektorat	73,00 (BB)

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja *(performance plan)* 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja.

Tabel.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	2.300.000.000. 000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Persentase Waktu penyelesaian perizinan usaha	95,00
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP hasil Evaluasi Inspektorat	73.00
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
a.	**Bidang Penanaman Modal**		
I.	Meningkatnya Investor PMA/PMDN yang berskala Nasional	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	45 Investor
II.	Meningkatnya Nilai realisasi Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMA Jumlah Investasi PMDN	1,60 Triliun 700 Milyar
b.	**Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu**		
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	Database Penanaman Modal yang Valid	1 Dokumen
c.	**Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan**		
1.	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal	95 %
d.	**Sekretariat**		
1.	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,00%
No	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target**
a.	**Bidang Penanaman Modal**		
1.	Terwujudnya Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang	Persentase PMA/PMDn yang terfasilitasi	100%

	Penanaman Modal		
2.	Terwujudnya Peta Potensi Investasi	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten	100 %
3.	Terwujudnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	3 MoU
b.	**Bidang Pelayanan Penanaman Modal**		
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2.	Terwujudnya Pengolahan serta penyajian data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Data dan informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%
c.	**Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**		
1.	Terwujudnya peningkatan nilai Realisasi Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	90%
d.	**Sekretariat**		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Persentase Realisasi pendapatan perangkat daerah	100%
5.	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
6.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
7.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%
8.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
9.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

	pemerintahan daerah yang siap pakai		

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	**Bidang Penanaman Modal**		
1.	Tersedianya Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi PM yang tersedia	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peta Potensi	Jumlah Peta Potensi yang tersedia	1 Dokumen
4.	Tersusunnya Strategi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi yang dibuat	3 Dokumen
5.	Terlaksananya Pameran Promosi penanaman Modal	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2 Event
b.	**Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu**		
1.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang diterbitkan izinnya	6.000 Izin 3.000 Izin
2.	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat	Jumlah Konsultasi pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti	25 Pengaduan
3.	Tersedianya data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen
c.	**Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan**	-	
1.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	244 Pelaku Usaha
2.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	15 Kegiatan
d.	**Sekretariat**		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen

4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen
5.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
6.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen
7.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	13 Orang
8.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	15 Jenis
9.	Tersedianya Peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	1 Paket
10.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	1 Paket
11.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis
12.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis
13.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exampler
14.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	150 Orang
15.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	350 Kali
16.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	1 Unit
17.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit
18.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasi	1000 Surat
19.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening
20.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 Orang
21.	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	9 Unit
22.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit
23.	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah gedung kantor	1 Unit

	dan bangunan lainnya dengan baik	dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
24.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	20 Orang
25.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen

2.4 Rencana Anggaran DMPTSP Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9) tanggal 16 Oktober 2024; Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 33) tanggal 16 Oktober 2023. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp 5.909.121.498 dengan alokasi belanja sebagai berikut:

Tabel 9.

Program Utama DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	% (ANGGARAN TOTAL BELANJA LANGSUNG)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	297.398.700	5,03
		2.	Promosi Penanaman Modal	2.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	742.131.970	12,55
		3.	Pengendalian Pelaksanaan	3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	472.532.000	7,99

			Penanaman Modal		Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayan Perizinan dan Non Perizinan	4.	Pelayanan Penanaman Modal	4.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	340.309.450	5,75
		5.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman Modal	5.	Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.000.000	0,40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD, Rencana Aksi Kinerja maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan Penanaman Modal dan PTSP itu sendiri sebagai fungsi actuating kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala OPD dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi,dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memilikisistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemenkinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapatdiandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s.d Tw.4	REALISASI s.d Tw.4	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	2,300 Triliun	3,327 Triliun	144,67 %	🔴
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata Waktu penyelesaian perizinan usaha	95,00	99,40	104,6 %	🔴
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96,00	96,00	100	🟢

Keterangan : 🟢 Mencapai/Melampui Target ; 🔴 Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis I
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Tabel 11.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Ket
Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif di Daerah	a.	Total Nilai Investasi	Juta Rupiah	2.300.000	3.327.337	144,67	🔴
	1.	Nilai Investasi Modal Asing (PMA)	Juta Rupiah	1.600.000	2.533.723	158,31	🟢
	2.	Nilai Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rupiah	700.000	793.614	113,28	🔴

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) s.d Tw.4 Tahun 2024

Keterangan : 🟢 Mencapai/Melampui Target ; 🔴 Belum Mencapai Target

Secara total nilai investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur terealisasi sebesar 144,67% atau sebesar Rp 3.327.337.640.056,- dari target sebesar Rp 2.300.500.000.000,-

Adapun Target Realisasi Investasi Tahun Tahun 2023 dan Tahun 2024 terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12.

Perbandingan Capaian Investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 – 2024

No	Jenis Investasi	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	PMA	2.650.000.000.000	2.974.791.374.751	112,25	1.600.000.000.000	2.533.723.079.342	158,31
2	PMDN	850.000.000.000	1.049.645.884.399	123,48	700.000.000.000	793.614.560.714	113,28
	TOTAL	3.500.000.000.000	4.024.437.259.150	114,98	2.300.000.000.000	3.327.337.640.056	144,67

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{(Jumlah Investasi n - jumlah investasi tahun n-1)}}{\text{Jumlah Investasi Tahun n-1}} \times 100\ \%$$

$$\frac{\text{(Rp 3.327.337.640.056 – Rp 4.024.437.259.150)}}{\text{Rp 4.024.437.259.150}} \times 100\%$$

= (17,32 %)

Dalam realisasi investasi itu, berhasil menyerap 12.885 orang tenaga kerja. Yang terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 12.7759 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 110 orang. Berdasarkan sector, realisasi investasi selama tahun 2024, yakni pertambangan; Listrik, Gas dan Air; Transportasi, gudang dan telekomunikasi; Makanan: dan Jasa Lainnya.

Target Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar Rp 3,5 Triliun dan pada Tahun 2024 sebesar Rp 2,3 Triliun atau berkurang sebesar Rp 1,2 Triliun.

Capaian Realisasi investasi pada Tw.4 Tahun 2023 dari target Rp 3.500.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.024.437.259.150 atau 114,98 % sedangkan Tw.4 Tahun 2024 dari target 2.300.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 3.327.337.640.056 atau 144,67 %. Realisasi investasi dari Tahun 2023 dibandingkan dengan Tw.4 Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 29,69 %.

Tabel. 13
Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017 – 2024
(Rp. 000.000,-)

NO	INVESTASI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PMA	120.117	639.033	549.259	2.185.879	3.604.254	2.947.236	2.974.791	2.533.732
2	PMDN	452.245	516.916	598.559	1.636.201	567.486	1.144.862	1.049.645	793.614

Indikator Kinerja 1.

Nilai Investasi PMA

Diagram. 2

Persentase Capaian Target Indikator Kinerja 1 DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2016 s.d 2024

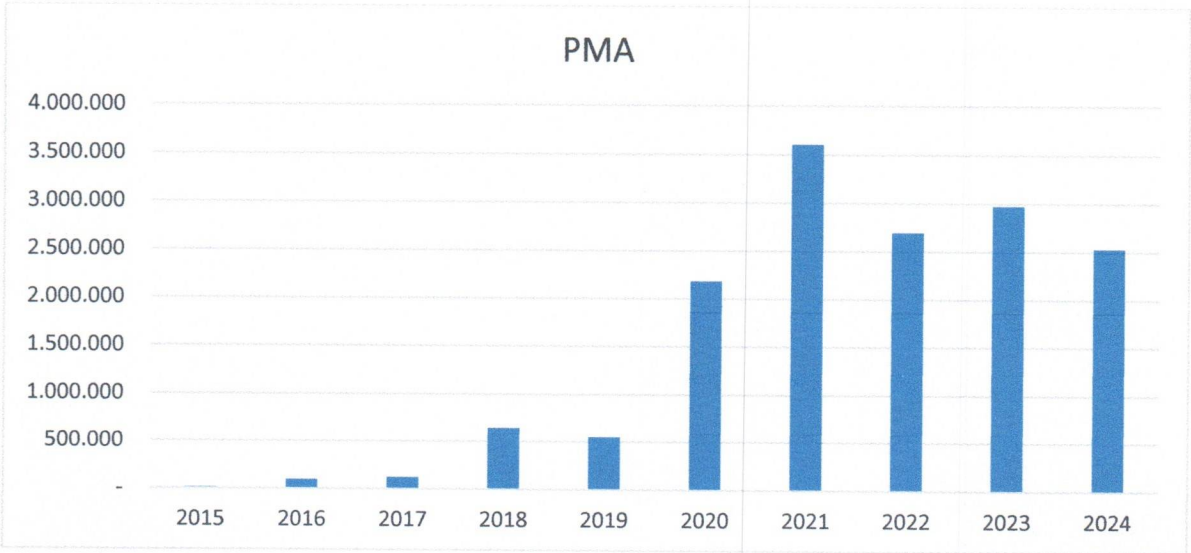

Penanaman Modal Asing (PMA)

Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang pertama yaitu Nilai realisasi Investasi Modal Asing (PMA) pada Tahun 2024 dengan target Rp 1.600.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 2.533.723.079.342,- untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi Investasi Modal Asing pada tahun 2024 dengan target Investasi Modal Asing pada tahun 2023 dikalikan 100%. Capaian realisasi PMA sebesar 158,31%. Untuk melihat lebih jelas pengukuran indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14

Realisasi Investasi Modal Asing (PMA) pada Tahun 2024

Uraian	Realisasi LKPM ($)	Realisasi (Rp) Asumsi $1 = Rp 15.416,-
1	2	3
PT. Vale	158.652.403	2.445.785.448.697
PT. Mars Simbiosince	415.238	6.401.310.402
PT. Mars Simbiosince Indonesia	111.318	1.716.080.769
Bao Hua Investment	-	-
Arkora Hydro	-	-
PT. Arkora Hydro Malili	-	-
PT. Huali Nickel Indonesia	407.612	6.283.748.365
PT. Huali industrial Park	3.697.451	56.999.915.561
PT. Telekomunikasi Selular	1.072.689.	16.536.575.548
Total	**$ 164.356.712**	**Rp 2.533.723.079.342,-**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 (nilai tukar Kurs 1$ = Rp 15..416 bulan Desember 2024)

Perkembangan realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan izin usaha ini sangat bergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha (PMA) dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik, maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun – tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus di tingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu Timur cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, dengan upaya secara terus menerus meningkatkan pelayanan perizinan.

Perbandingan Capaian Jumlah Investasi PMA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2024

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	0	–	0	Rp. 268.605.000.000
2017	21	-	21	Rp. 120.117.000.000
2018	34	-	34	Rp. 603.035.000.000
2019	13	-	13	Rp. 549.259.000.000
2020	8		8	Rp. 2.185.879.000.000
2021	8	8.003.575.455.108	8	Rp.3.604.254.631.433
2022	9	183.367.444.000	10	Rp.2.947.236.398.569
2023	20	31.794.525.771.500	12	Rp.2.974.791.374.751
2024			10	Rp.2.533.723.079.342

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Sebagai salah satu acuan untuk menilai keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilihat perbandingan hasil realisasi kinerja dengan Tahun sebelumnya.

Indikator nilai investasi PMA pada Tahun sebelumnya (Tahun 2023) terealisasi sebesar Rp 2.974.791.374.751,- dengan target sebesar Rp 2.650.000.000.000,-, artinya capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 112,25% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai investasi pada Tahun 2024 yang diperoleh sebesar Rp 2.533.723.079.342,- dengan target sebesar Rp 1.600.000.000.000 tercapai sebesar 158,30%. maka terdapat penurunann nilai realisasi investasi PMA sebesar Rp 441.068.295.409.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun (sebelumnya) 2023

Capaian Realisasi investasi pada Tahun 2023 dari target Rp 2.650.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.974.791.374.751 atau 112,25% sedangkan Tahun 2024 dari target 1.600.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 2.533.723.079.342

atau 158,30%. Realisasi investasi dari Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 46,05 %.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Tahun 2024

Pada Renstra DPMPTSP tahun 2021 - 2026 menetapkan target indikator kinerja nilai investasi PMA untuk kondisi kinerja pada akhir Tahun 2026 adalah sebesar Rp.3.000.000.000.000,00. Apabila realisasi kinerja nilai investasi PMA sampai Tahun 2024 sebesar Rp. 2.533.723.079.342,- dibandingkan dengan target akhir Renstra , maka telah mencapai 84,45%.

Penurunan capaian realisasi investasi Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) , namun disertai peningkatan kinerja, biasanya terjadi karena penyesuaian target kinerja yang lebih rendah. Untuk target investasi Tahun 2024 diturunkan karena:

1. Kondisi ekonomi Domestik, Pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga kemampuan menarik investasi menurun, Tantangan fiskal, seperti inflasi yang tinggi atau defisit anggaran, yang mengurangi daya tarik investasi.
2. Kebijakan Pemerintah, Adanya reformasi regulasi atau birokrasi yang masih dalam proses, sehingga investor lebih berhati-hati.
3. Penyesuaian realistis, Target sebelumnya dianggap terlalu ambisius dan tidak realistis, sehingga disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi terkini.

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan yang dihadapi selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Keberhasilan :
   a. Adanya komitmen dari semua aparatur, pejabat struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur
   b. Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
   c. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian LKPM oleh pelaku usaha.
   d. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Berusaha melalui aplikasi perizinan secara online (OSS RBA)
   e. Sudah diberlakukannya TTE (tanda tangan elektronik) penerbitan izin Non berusaha melalui Srikandi sehingga pemohon izin tidak perlu datang ke kantor

f. Adanya sarana konsultasi, informasi dan pengaduan melalui surat langsung ke Perangkat Daerah, WA dan Kotak Pengaduan.

2. Faktor Peningkatan kinerja:

a. Pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait permasalahan pelaporan.
b. Pembinaan dan bimbingan teknis pelaporan LKPM dengan narasumber dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, OPD Teknis dan Praktisi akademisi.
c. Pelaksanaan pendampingan secara langsung yang dilaksanakan di kantor perusahaan bersangkutan.
d. Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA).
e. Evaluasi pelayanan perizinan secara berkala untuk peningkatan dan optimalisasi pelayanan perizinan

Indikator Kinerja 2.

Nilai Investasi PMDN

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Capaian Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Nilai realisasi Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Tahun 2023 dengan target Rp 850.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 1.049.645.884.339,- sedangkan pada Tahun 2024 dengan target 700.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 793.614.560.714 atau sebesar 113,28%. Untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi Investasi Modal Dalam Negeri pada tahun 2024 dibagi dengan target Investasi Modal Dalam Negeri pada tahun 2023 tersebut dikalikan 100%.

Diagram. 3

Persentase Capaian Target Indikator Kinerja 2 DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2024

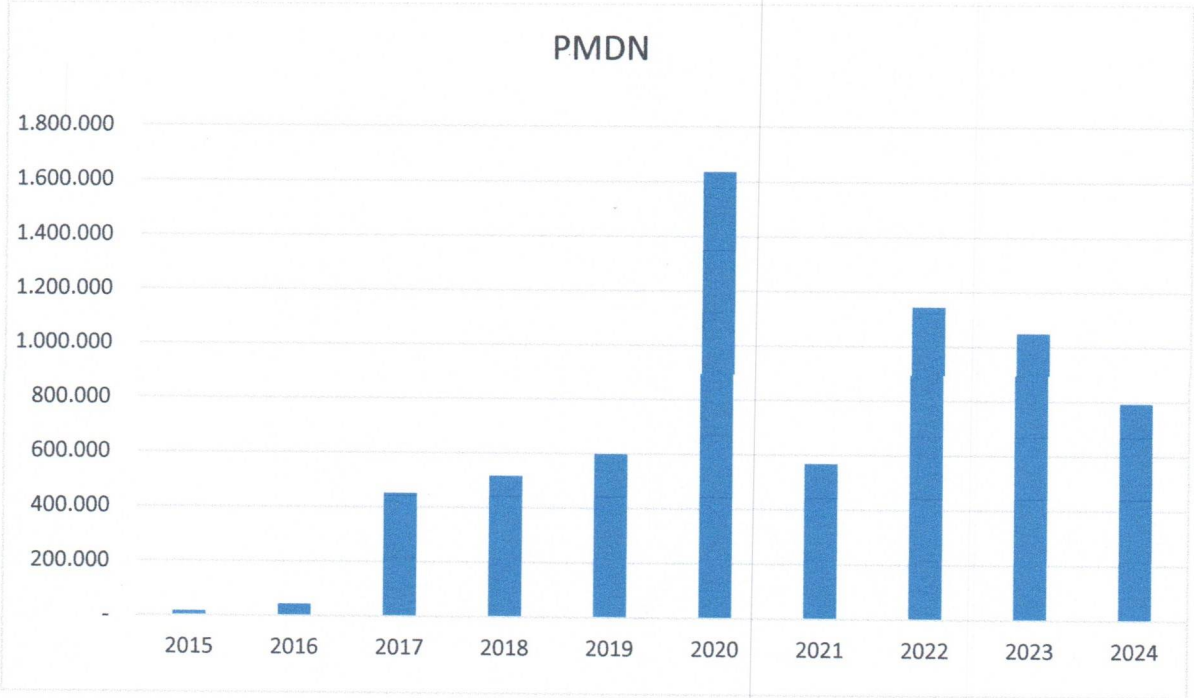

Tabel 15

Realisasi Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2024

NO	Nama Perusahaan PMDN	Realisasi
1	ATHALA KREASI MEDIA	65.000.000
2	CV. ASIA TIMUR SENTOSA	245.000.000
3	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	940.000.000
4	CV. AZZAHRA	130.000.000
5	CV. BANUMBU KARYA	69.000.000
6	CV. BINTANG MAHALONA PERKASA	6.200.000
7	CV. BINTANG MODERN INDONESIA	5.000.000

8	CV. CHAYLER PERKASA	2.050.000.002
9	CV. DANISH PUTRA WOTU	6.000.000
10	CV. DEA CIPTA SARANA	81.000.000
11	CV. GLORY PROJECT	40.700.000
12	CV. HANIN KONSTRUKSI	190.000.000
13	CV. INDO MULIA KARYA	30.500.000
14	CV. IRISH CORP	100.600.000
15	CV. JALAJJA PUTRA	10.000.000
16	CV. KARYA MADANI PRATAMA	440.000.000
17	CV. MAHESWARI LANDSKAP	180.000.000
18	CV. MATTIRO DECENG LUTIM	150.000.000
19	CV. PADOE PUTRA PRATAMA	75.000.000
20	CV. PUTRA BUNGSU SESA	955.050.000
21	CV. RAJAWALI ALPHA MOLIO	145.000.000
22	CV. SARAMAI MANDIRI	20.300.000
23	CV. SHIDQI	145.000.000
24	CV. TIMUR ENGINEERING	1.270.000.000
25	CV. TIMUR INDONESIA	737.000.000
26	CV. TIMUR PRIMA	101.000.000
27	CV. WATIK NAHNU BERLIAN	5.000.000
28	CV. ZEFANO ANUGERAH KURNIA	1.456.000.000
29	CV. ZIDAN FALAHI	500.000.000
30	CYBER INTERMEDIA RAHMATQHAIREEN	45.000.000
31	DHIAR TECHNOLOGY INTERMEDIA	45.000.000
32	HENGRIAWAN	6.000.000
33	KOPERASI JASA NEVIDA DANIO ECO	55.000.000
34	PT. BUANA CIPTA KARSA	

		1.091.200.000
35	PT. ABE BAROKAH JAYA	1.050.000.000
36	PT. ABYSSAL BERITA LUTIM	10.000.000
37	PT. ALD OCEAN NUSANTARA	5.220.000.000
38	PT. ALIMASI REYHAN MANDIRI	43.727.820.000
39	PT. ANEKA JASA SOROWAKO	112.473.874.911
40	PT. ANGKASA JASA MULIA	123.515.526
41	PT. AQIEL RIFF MEDIA	6.000.000
42	PT. ARBA INSAN MULYA	724.570.000
43	PT. ARKORA HIDRO MALILI	58.536.714.457
44	PT. ARMADA TUNASJAYA ABADI	47.226.117
45	PT. ASME KOMUNIKASI LUTIM	47.000.100
46	PT. ATHALAH KREASI MEDIA	65.000.000
47	PT. BERLIAN NUHA PERSADA	1.080.000.000
48	PT. BUJAYA KARYA MAKMUR	118.383.333.333
49	PT. BUMI MANDIRI PERKASA WASUPONDA	50.000.000
50	PT. BUMI SIKKUNG SULAWESI	100.000.000
51	PT. CAHAYA LUTIM INTERMEDIA	3.000.000
52	PT. CENDRAWASIH KARYA CEMERLANG	7.000.000
53	PT. CITRA LAMPIA MANDIRI	4.741.307.332
54	PT. CUPUMANIK GEMAH PERMATA	990.500.000
55	PT. CYBER INTERMEDIA RAHMATQHAIREEN	80.000.000
56	PT. DAYA INDAH YASA	36.953.899
57	PT. DELAPAN DELAPAN TOWUTI	2.914.600.000
58	PT. DELAPAN INTAN MUTIARA	105.000.000
59	PT. DUA PILAR UTAMA	65.500.000
60	PT. EPID MENARA ASSETCO	10.500.000

61	PT. GLOBAL ASISTENSI MEDIKA	236.505.000
62	PT. HADJI KALLA	234.444.595
63	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	570.000.000
64	PT. HASNI INTERMEDIA UTAMA	4.000.000
65	PT. HUAMEI NICKEL INDONESIA	80.842.975
66	PT. ILADAT PRIMA MANDIRI	2.500.000
67	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	6.490.968.659
68	PT. INDRA PRATAMA WASUPONDA	11.327.671.301
69	PT. KELAPA GADING BERLIAN	700.500.000
70	PT. KEPALA GADING BERLIAN	1.100.500.000
71	PT. LALOMERUI NUSA ENERGI	415.000.000
72	PT. LATANINDO GRAHA PERSADA	6.600.000.000
73	PT. LUTIM NEWS GRAMEDIA	94.000.000
74	PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR	1.500.000
75	PT. MAHARANI SYAM GROUP	7.000.000.000
76	PT. MALILI GLOBAL MEDIKA	1.544.000
77	PT. MANDIRI PALMERA AGRINDO	3.522.000
78	PT. MEDIA AZIZI UTAMA	3.000.000
79	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	917.325.232
80	PT. MINERAL PONGKERU MANDIRI	4.670.049.435
81	PT. MIRASA	7.000.000
82	PT. MOJONG MITRA MAJU	280.000.000
83	PT. NAJWA MULIA SEJAHTERA	13.000.000
84	PT. NUSA SEJAHTERA BINA ENERGI INDONESIA	300.000.000
85	PT. PALMA ANUGERAH MARITIM	60.000.000
86	PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	176.082.137
87	PT. PRIMA UTAMA LESTARI	

		101.167.662.718
88	PT. PUNCAK INDAH PRATAMA	65.000.000
89	PT. RUSTIKA GLOBAL INDONESIA	83.489.292
90	PT. SAMATOR INDO GAS	110.988.139.342
91	PT. SINAR KASIH SOROWAKO	1.050.000.000
92	PT. SINYAL TAJAM INDONESIA	58.000.000
93	PT. SULINDO PUTRA TIMUR	1.000.000
94	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	13.712.245.161
95	PT. SUMBER RAHMAT PERTIWI	7.028.872.638
96	PT. SUMPALABBU DIGITAL MEDIATAMA	16.500.000
97	PT. TANAH TIMUR PROPERTI	10.850.500.000
98	PT. TAPOJIE MEDIA INDONESIA	500.000
99	PT. TARUNA MANDIRI UTAMA	10.684.150.000
100	PT. TOWUTI PURNAMA JAYA	28.485.000.000
101	PT. TRAKINDO UTAMA	180.000.000
102	PT. TUNAS DWIPA MATRA	279.779.193
103	PT. USA RIZQ SENTOSA	50.000.000
104	PT. WAHANA MULTI NIAGA	33.762.022.400
105	PT. ADHI GUNA SOROWAKO	1.012.000.000
106	PT. AIME TRIO GROUP	682.000.000
107	PT. ALE LUWU RAYA	382.000.000
108	PT. ALIF WAHANA PUTRA MANDIRI	600.000.000
109	PT. ALYA PUTRICA ENERGY	60.000.000
110	PT. AMAL SEHAT INDONESIA	48.000.000
111	PT. ANANDA PONGKERU JAYA	370.000.000
112	PT. ANEKA WIJAYA (JL.POROS WAWONDULA TIMAMPU)	5.834.700.000
113	PT. ANUGRAH ARTHA MANDIRI JASA	182.365.000

114	PT. BAGUS KARYA SOROWAKO	15.000.000
115	PT. BATARA SAKTI BALAMBANO	1.500.000
116	PT. BINTANG MANDIRI VERBEK	100.000.000
117	PT. BOJANG MANDIRI	100.000.000
118	PT. BRILIANT RADIATOR CENTER	194.179.248
119	PT. BUMI BATARA AGRO	320.000.000
120	PT. DIGNITY MULTI MEDIA	2.000.000
121	PT. DWIQA SHARA SOLUSI	4.936.340.864
122	PT. DZAKAABRAR BUKIT MALILI	97.500.000
123	PT. GLOBAL TEKNOLOGI INDOSERV	965.000.000
124	PT. GUNUNG VERBECK KAREBBE	2.620.000.000
125	PT. HAERANI GAS	1.200.000.000
126	PT. HARINDO GAS UTAMA	350.000.000
127	PT. HAWA MOLINDO TEKNIK	60.000.000
128	PT. IBRA KARYA MANDIRI	20.000.000
129	PT. INTI ASET SELAWESI INDONESIA	1.944.000.000
130	PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA	672.412.811
131	PT. KEMBAR CIPTA RAYA	500.000.000
132	PT. KLANASIA CITRA MULYA	1.400.000.000
133	PT. LAUTAN INTAN MATANO	10.000.000
134	PT. LUTIM GASINDO PERSADA	2.399.819.820
135	PT. MINJA GLOBAL MANDIRI	4.035.452.138
136	PT. MOBILKOM TELEKOMINDO	31.340.879.072
137	PT. NICKEL PRIMA UTAMA	419.000.000
138	PT. OMEGA LUWU TIMUR SATU	78.900.645
139	PT. PANCA DIGITAL SOLUSION	1.066.980.026
140	PT. PONGKERU MUTIARA ABADAI	

		467.200.000
141	PT. PUMA JAYA UTAMA	125.000.000
142	PT. PUTRA ALMAIDAH UTAMA	1.810.000.000
143	PT. PUTRA PONGKERU UTAMA	540.000.000
144	PT. RISWAN KARYA SEJATI	351.500.000
145	PT. SUMBER ENERGI MAPPATUO	2.000.000
146	PT. SUMBER WAHAU JAYA	42.606.433
147	PT. SURYA WARSA ABADI	5.000.000
148	PT. TONGGIMO INTI NIAGA	160.000.000
149	PT. UWAIS MANDIRI UTAMA	1.250.000.000
150	PT. WIRANA BEVELINDO HUTAMA	65.000.000
151	PT. YULIANA INTI PERSADA	2.001.942.902
152	RIFAL	4.500.000
153	SUPRIONO	1.027.000.000
Total		**793.614.560.714**

Kab. Luwu Timur Tahun 2017-2024

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2017	30	416.715.000	30	452.245.000.000
2018	34	646.710.000.000	34	516.916.000.000
2019	32	6.120.947.250.000	32	598.558.569.406
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539
2021	41	1.932.338.626.816	422	567.486.903.997
2022	1749	5.072.166.453.138	131	1.114.862.849.673
2023	9262	3.488.504.120.743	72	1.049.645.884.399
2024			425	793.614.560.714

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2023, Indikator nilai investasi PMDN terealisasi sebesar Rp. 1.049.645.884.399,- dengan Target sebesar Rp. 850.000.000.000,- maka terealisasi sebesar 123,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai investasi PMDN Tahun 2024 yang diperoleh sebesar Rp. 793.614.560.714,- dengan Target sebesar Rp. 700.000.000.000,- maka tercapai sebesar 113,28 %.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja nilai investasi PMDN pada Tahun 2023, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 123,48%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 113,28 % maka terjadi Penurunan sebesar 10,2 point. Nilai Realisasi Investasi PMDN mengalami penurunan pada Tahun 2024 dibandingkan pada tahun sebelumnya (2023) disebabkan:

- Masih terdapat pelaku usaha yang masih belum memahami tata cara penyampaian LKPM melalui OSS.
- Admin LKPM dari pelaku usaha/perusahaan yang sering berganti personil tanpa dibekali informasi tentang pelaporan LKPM oleh admin sebelumnya.
- Beragam permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memproses perizinan berusaha di OSS.
- Pelaku usaha khususnya skala UMK yang sudah memiliki NIB tapi belum melakukan migrasi/update data usaha. .
- Pada saat kunjungan identifikasi penyelesaian permasalahan, pelaku usaha belum mengetahui update regulasi terbaru mengenai perizinan berusaha OSS berbasis risiko.
- Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif. Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Luwu Timur terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Luwu Timur.
- Tingkat pelaporan LKPM oleh pelaku usaha belum optimal karena masih terdapat pelaku usaha yang masih belum memahami tata cara penyampaian LKPM melalui OSS sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum

maksimal meskipun target telah terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2026

Pada Renstra DPMPTSP tahun 2021 - 2026 menetapkan target indikator kinerja nilai investasi PMDN untuk kondisi kinerja pada akhir Tahun 2026 adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,00. Apabila realisasi kinerja nilai investasi PMDN Tahun 2024 sebesar Rp. 793.614.560.714,- dibandingkan dengan target akhir tahun, maka telah mencapai 79,36%.

❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Nilai Realisasi Investasi Daerah yaitu :

A. **Program Pengembangan iklim Penanaman Modal** didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota:
   a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Subkegiatan ini adalah kegiatan pendampingan dan fasilitasi bagi UKM dengan Bank dan pihak-pihak pemberi pinjaman dan kemudahan pemberian modal.
   b. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal, subkegiatan ini adalah kegiatan penyediaan PERDA penanaman modal yang akan digunakan sebagai regulasi dalam kegiatan peningkatan investasi.

B. **Program Promosi Penanaman Modal** didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terbagi menjadi 2 subkegiatan yaitu:
   a. Subkegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal yang indikatornya yaitu jumlah media promosi Penanaman Modal. Jumlah media yang digunakan adalah media surat kabar yang digunakan untuk meliput pemberitaan Penanaman Modal. Pada tahun 2024 terealisasi 2 media.
   b. Subkegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota, indikator subkegiatan adalah jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan, dari target 3 kegiatan pameran terealisasi hanya 2 kegiatan antara lain : Temu

Saudagar di Malili, Pameran APKASI di JCC Jakarta, kegiatan Temu Bisnis yang direncanakan akan dilaksanakan di Surabaya Karena adanya Rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan ini batal dilaksanakan.

C. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,** didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, sumber Pendanaan Dana Transfer Khusus DAK non Fisik , yang terbagi menjadi 2 subkegiatan yaitu:
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah Kegiatan pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Realisasi pada Tahun 2024 sebanyak 240 orang dan terealisasi 253 orang.
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Pada Tahun 2024 target kinerja sebanyak 15 jenis bidang usaha dan terealisasi sebanyak 14 Bidang usaha.
   c. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dengan target indikator Jumlah Kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahan nya sebanyak 9 kegiatan usaha dan terealisasi 100%.

➢ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Nilai Realisasi investasi, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran karena Rasionalisasi anggaran untuk pelaksanaan Temu Bisnis dengan para Investor di Surabaya dibatalkan.
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Terhadap perkembangan investasi Kabupaten Luwu Timur data yang disampaikan baru berdasarkan terhadap izin yang diterbitkan sehingga belum mencerminkan data investasi secara keseluruhan.
- Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi.

- **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan kepada pihak team TAPD dan Bappelitbangda untuk mengalokasikan dana yang lebih besar
- Meningkatkan pembinaan dan pemantauan kepada PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Luwu Timur, sehingga data investasi dan nilai investasi bisa lebih akurat.
- Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
- Melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait

- **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis DPMPTSP, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu :

- Penyesuaian dan perubahan anggaran pada sub kegiatan Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal . Perubahan terjadi pada Belanja ATK, belanja cetak, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

- **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi Investasi dan peluang usaha di Daerah maka dapat terfasilitasi dengan adanya Media Koran, website, aplikasi LKPM, dokumen Peta potensi.
- Sumber daya yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DPMPTSP tetap berupaya melakukan pelatihan dan Bimtek Pelayanan Perizinan untuk bekerja maksimal dalam penyebaran informasi. Sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur sebanyak 42 orang yang terdiri dari 20 orang ASN, 22 orang Upah Jasa.

Tabel. 17
Pencapaian Kinerja dan Anggaran pada Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	**Realisas**	**Capaian (%)**	**Alokasi**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	2,300 Triliun	3,327 Triliun	144,67 %	1.512.062.670,-	1.213.655.850,-	80,26 %

1. Perbandingan antara target dan realisasi TA. 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel. 18
Perbandingan Target dan Realisasi Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Nilai realisa investasi Daerah						Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	**Tahun 2023**			**Tahun 2024**			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Realisasi Investasi	3,500 Triliun	4,024 Triliunr	114,98 %	2,300 Triliun	3,327 Triliun	144,67 %	4,030 Triliun

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian pada Tahun 2024 lebih tinggih dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2023). Hal ini disebabkan karena adanya:

a. Pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait permasalahan pelaporan.
b. Pembinaan dan bimbingan teknis pelaporan LKPM dengan narasumber dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, OPD Teknis dan Praktisi akademisi.
c. Pelaksanaan pendampingan secara langsung yang dilaksanakan di kantor perusahaan bersangkutan.
d. Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA).
e. Evaluasi pelayanan perizinan secara berkala untuk peningkatan dan optimalisasi pelayanan perizinan kesadaran pelaku usaha (PMA/PMDN) dalam melaporkan realisasi kegiatannya dalam aplikasi LKPM, selain itu

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan jumlah investor dalam berusaha.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

Berdasarkan realisasi sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026 bisa dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai realisasi investasi setiap tahunnya.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Tahun 2024 dengan target Total Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 19
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Total Tahun 2026

Sasaran I :	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah		Target Akhir Tahun 2026	% Capaian s/d terhadap Target Akhir Tahun 2024
Indikator Kinerja Sasaran	**Realisasi**			
	Pada Tw.4 Tahun 2024	Total realisasi sampai dengan tahun 2024		
Nilai realisasi investasi Daerah	1,250 Triliun	3,327 Triliun	4.030 Triliun	82,55 %

3. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Kabupaten dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulsel, realisasi investasi sampai Tahun 2024 senilai Rp 14,035 Triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 5,623 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 8,411 triliun. Serapan tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN mencapai 23.567 orang dengan rincian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 23.476 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 191 orang.

Sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar masih dipegang pertambangan yang mencapai Rp 4.020.818.538.962. Selanjutnya sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp 1,016 Triliun; sektor listrik, gas, dan air Rp 602 miliar; sektor perdagangan

dan reparasi Rp1,391 Triliun; dan sektor Transportasi Gudang dan Makanan Rp 1,356 Triliun.

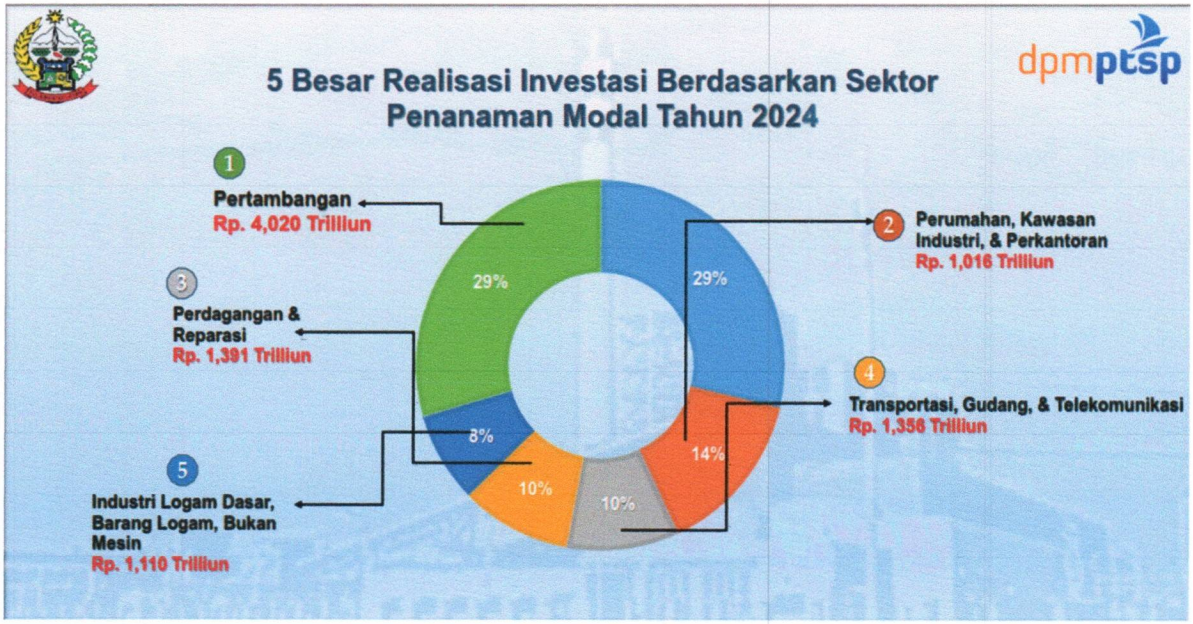

Lima Kabupaten/Kota yang melaporkan realisasi investasi penanaman modalnya pada Tahun 2024 ditempati Kota Makasar 3,827 Triliun, Luwu Timur 2,948 Triliun, Luwu, 1,290 Triliun, Bantaeng 1,150 Triliun, Maros 928 Miliar.

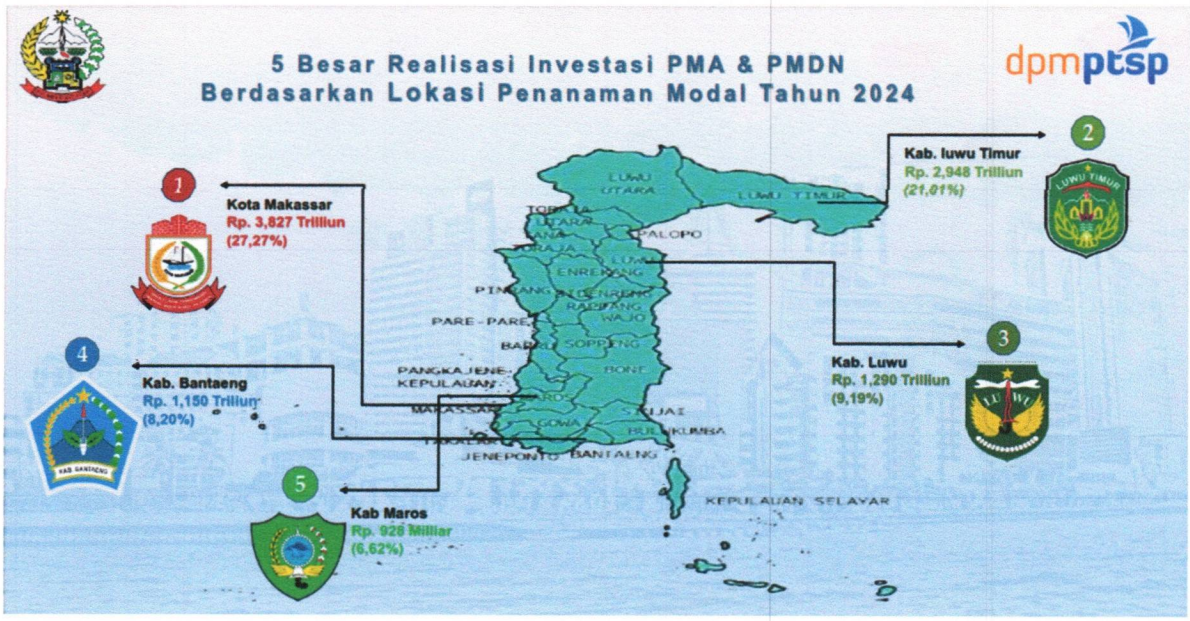

Bila dibandingkan dengan capaian Realisasi Investasi Kabupaten Luwu Timur Rp 3.327.337.640.056 dengan Provinsi Sulawesi Selatan Rp 14,035 Triliun pada Tahun 2024 maka tercapai sebesar:

= (3,327 Triliun / 14,035 Triliun) x 100%

= 23,70 %

Realisasi Investasi PMA & PMDN Tahun 2024
Berdasarkan Lokasi Penanaman Modal

No.	Lokasi	Penanaman Modal Asing (PMA)				%
		Proyek	TKI	TKA	Investasi	
1	Kab Luwu Timur	55	311	4	Rp 2.563.553.468.588	45,58%
2	Kab Luwu	24	30	0	Rp 1.074.315.916.884	19,10%
3	Kab Bantaeng	76	84	90	Rp 1.024.963.866.973	18,22%
4	Kota Makassar	1.103	1.053	11	Rp 541.568.882.807	9,63%
5	Kab Gowa	62	209	0	Rp 102.980.258.155	1,83%
6	Kab Pinrang	49	208	0	Rp 87.074.046.020	1,55%
7	Kab Maros	115	49	2	Rp 77.690.123.093	1,38%
8	Kab Barru	41	27	1	Rp 33.051.581.442	0,59%
9	Kab Sidrap	23	5	0	Rp 27.767.370.949	0,49%
10	Kab Pangkep	24	0	0	Rp 19.798.205.465	0,35%
11	Kota Pare-pare	13	0	0	Rp 15.064.702.274	0,27%
12	Kab Bulukumba	69	15	25	Rp 12.793.572.749	0,23%
13	Kab Jeneponto	32	4	0	Rp 10.789.332.987	0,19%
14	Kab Wajo	42	21	0	Rp 10.265.163.874	0,18%
15	Kab Takalar	26	11	2	Rp 7.437.573.389	0,13%
16	Kota Palopo	11	1	0	Rp 5.059.216.742	0,09%
17	Kab Luwu Utara	44	0	0	Rp 3.826.231.103	0,07%
18	Kab Bone	39	11	0	Rp 3.558.585.700	0,06%
19	Kab Selayar	20	0	0	Rp 1.164.337.725	0,02%
20	Kab Enrekang	28	0	0	Rp 1.115.587.725	0,02%
21	Kab Toraja Utara	13	1	0	Rp 128.729.300	0,00%
22	Kab Tana Toraja	13	0	0	Rp -	0,00%
23	Kab Soppeng	0	0	0	Rp -	0,00%
24	Kab Sinjai	0	0	0	Rp -	0,00%
	Jumlah	1.922	2.040	135	Rp 5.623.966.753.944	

No.	Lokasi	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)				%
		Proyek	TKI	TKA	Investasi	
1	Kota Makassar	11.337	10.218	3	Rp 3.286.368.854.129	39,07%
5	Kab Maros	1.023	1.170	0	Rp 851.305.493.105	10,12%
7	Kota Palopo	852	811	1	Rp 687.145.142.284	8,17%
6	Kab Gowa	1.095	361	0	Rp 628.367.256.448	7,47%
9	Kab Takalar	352	457	1	Rp 429.331.463.567	5,10%
8	Kab Jeneponto	186	104	0	Rp 428.828.998.921	5,10%
2	Kab Luwu Timur	1.316	1.054	0	Rp 385.279.277.942	4,58%
3	Kab Luwu	379	422	49	Rp 215.967.925.911	2,57%
10	Kab Pangkep	306	575	0	Rp 192.401.975.653	2,29%
13	Kota Pare-pare	1.073	683	0	Rp 173.108.408.667	2,06%
11	Kab Barru	259	63	2	Rp 169.780.104.029	2,02%
15	Kab Toraja Utara	109	60	0	Rp 148.427.256.795	1,76%
14	Kab Bulukumba	576	371	0	Rp 136.934.773.303	1,63%
4	Kab Bantaeng	215	60	0	Rp 125.720.871.719	1,49%
12	Kab Pinrang	308	275	0	Rp 106.466.087.576	1,27%
17	Kab Bone	673	889	0	Rp 90.560.540.927	1,08%
19	Kab Tana Toraja	136	95	0	Rp 82.462.314.394	0,98%
18	Kab Wajo	376	250	0	Rp 78.938.937.460	0,94%
16	Kab Sidrap	257	193	0	Rp 76.664.981.236	0,91%
20	Kab Luwu Utara	273	116	0	Rp 41.880.111.610	0,50%
21	Kab Soppeng	165	89	0	Rp 34.741.025.630	0,41%
22	Kab Selayar	76	43	0	Rp 27.297.347.421	0,32%
23	Kab Enrekang	100	20	0	Rp 8.835.837.699	0,11%
24	Kab Sinjai	112	21	0	Rp 5.138.747.636	0,06%
	Jumlah	21.554	18.400	56	Rp 8.411.953.734.062	

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel . 20

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 DPMPTSP Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	a.	Rata-rata waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan	%	95,00	99,40	104,63

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

Rata-rata lama penyelesaian Perizinan dihitung dengan cara membagi antara jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan izin yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\text{Rata-rata penyelesaian Perizinan} = \frac{\sum \text{izin yang terbit tepat waktu}}{\sum \text{seluruh Berkas yang masuk}} \times 100\%$$

Jumlah total Berkas Masuk : 7.177 berkas
Jumlah total izin terbit : 7.177 izin
Jumlah izin terbit tepat waktu : 7.135 izin
Jumlah izin terbit tidak tepat waktu : 42 izin
Rata-rata penyelesaian izin = (7.135 : 7.177) x 100
= 99,40 %

Capaian kinerja program Pelayanan Penanaman Modal 99,40 % dari target 96%, tidak mencapai target hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan penerbitan beberapa izin dikarenakan terlambatnya rekomendasi dari tim teknis.

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan Survei Kepuasan masyarakat (SKM) dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP Kab. Luwu Timur menurut penilaian masyarakat.
2. Untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kab. Luwu Timur sehingga mampu menciptakan iklim Usaha dan kemudahan berusaha yang kondusif di Kabupaten Luwu Timur.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan metode Kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut.

Untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, pemerintah terus melakukan terobosan baru melalui pendekatan masyarakat, guna mendorong partisipasi aktif menyangkut dalam pembangunan. Olehnya itu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 telah menetapkan kebijakan tentang pedoman survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan public, pedoman itu dimaksudkan sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja instansi DPMPTSP dan diharapkan memberikan kepastian

masyarakat dalam menilai secara objektif dan continue terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan public di DPMPTSP.

Target tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur sebesar 85,40 atau kategori "baik". Pada Tahun 2024 dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan sebesar 87,86 atau mencapai 102,88 % dari target yang ditetapkan.

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel. 21

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Intervar Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25 – 64.99	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.26 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kuesioner tersebut terdapat 9 unsur pelayanan. Jumlah SKM pada Tahun 2024 **sebanyak 366 lembar kuesioner.** Dengan menggunakan perhitungan rumus dan cara yang ditetapkan sesuai pedoman umum penyusunan SKM Nomor 16 Tahun 2014, jumlah kategori tingkat pelayanan yang disesuaikan Survey Kepuasan Masyarakat 87,86 (Baik).

Tabel. 22

Nilai Unsur-Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,554
U2	Prosedur Pelayanan	3,454
U3	Ketepatan Waktu Pelayanan	3,395
U4	Biaya/tarif	3,973
U5	Produk Layanan	3,314
U6	Kompetensi pelaksana	3,438
U7	Perilaku Pelaksana	3,430
U8	Sarana dan Prasarana	3,476
U9	Penanganan Pengaduan	3,597
NRR Unsur = 31,631		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dihitung Nilai IKM Tahun 2024 sebagai berikut:

NRR Tertimbang = NRR Unsur x 1/9
= 31,631 x 1/9
= 3.514

IKM = Total NRR Tertimbang X 25
= 3,514 x 25
= **87,86**

Tabel. 23

Perbandingan Target dan Capaian IKM Tahun 2020 - 2024

CAPAIAN IKM	TARGET	REALISASI	(CAPAIAN)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tahun 2020	85,01	85,51	*100,59*	●
Tahun 2021	85,01	85,37	*100,42*	●
Tahun 2022	85,20	87,80	*103,05*	●
Tahun 2023	85,30	87,84	*102,97*	●
Tahun 2024	85,40	87,86	*102,88*	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

Diagram. 4

Persentase Capaian IKM DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2024

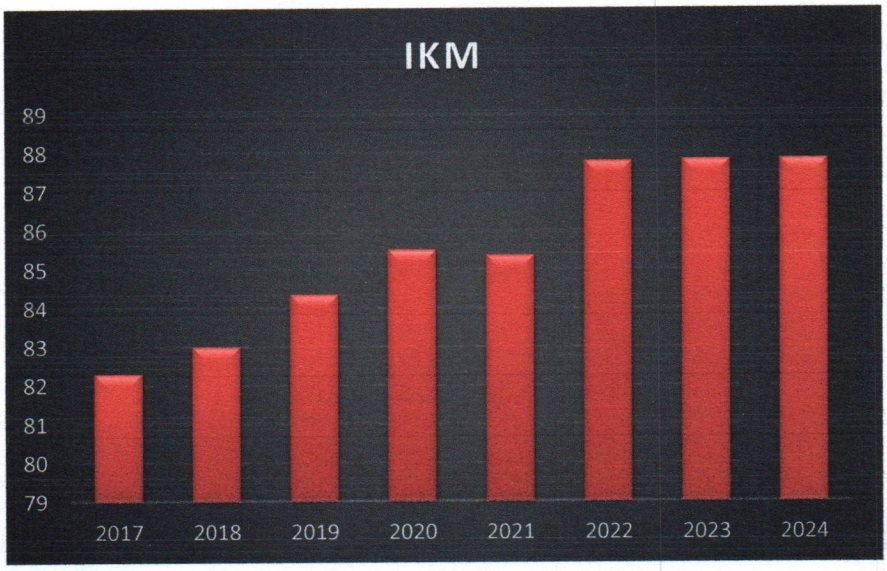

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik selama 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2021 hingga tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur adalah Sangat Baik, dan **kepuasan masyarakat tertinggi** adalah dalam unsur ***Biaya/Tarif***, karena Pemerintah sudah menggratiskan semua biaya pengurusan perizinan kecuali pada biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

IKM pada Tahun 2024 lebih tinggi dari pada Tahun 2023 disebabkan karena telah dilakukan tindak lanjut dan perbaikan ditahun 2024 atas hasil SKM Tahun 2023.

Nilai realisasi Izin mencapai 99,40 % disebabkan :

1. Adanya kemudahan Perizinan berbasis elektronik, sehingga pendaftaran bisa dilakukan oleh masyarakat umum atau pelaku usaha dimana saja dan kapan saja,
2. Tersedianya sarana dan Prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan perizinan,
3. Kepekaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan trasnparan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Berdasarkan dari berbagai unsur pelayanan yang mendapatkan nilai yang paling terendah adalah unsur Pelayanan Waktu yaitu sebesar 3,395 dan unsur Produk Layanan sebesar 3,314.

2. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Unsur biaya/tarif pelayanan yaitu 3,973 dan unsur penanganan pengaduan yaitu 3,597.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindaklanjut yaitu sebagai berikut :

- Penerbitan izin pada aplikasi OSS sangat lambat tidak sesuai dengan waktunya;

- Menurut saya Persyaratan Dokumen perizinan sebaiknya lebih dirampingkan lagi sehingga tidak banyak kelengkapan berkas/dokumen yang disiapkan; dan
- Pendingin ruangan dipelayanan Dpm-ptsp kurang baik.

Perbandingan Capaian Realisasi Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov. Sulsel cukup baik. Dilihat dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester II Tahun 2024 berada di angka **88,30**

Keterangan :
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM Masyarakat = Indeks Kepuasan
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,11

No.	UNSUR PELAYANAN	Σ NRR/UNSUR	NRR/UNSUR	NRR/TTB/UNSUR
U1	Persyaratan	1286	3,411	0,379
U2	Prosedur	1304	3,459	0,384
U3	Waktu pelayanan	1279	3,393	0,377
U4	Biaya/tarif	1476	3,915	0,435
U5	Produk layanan	1312	3,480	0,387
U6	Kompetensi pelaksana	1315	3,488	0,388
U7	Perilaku pelaksana	1315	3,488	0,388
U8	Sarana dan Prasarana	1294	3,432	0,381
U9	Penanganan Pengaduan	1403	3,721	0,413
U10	Transparansi Layanan	0	0,000	0,000
U11	Integritas Petugas Pelayanan	0	0,000	0,000

IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) : 88,30 = B

Mutu Pelayanan :
- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

NILAI IKM PELAYANAN	KATEGORI
88,30	B

Kepala Dinas PMPTSP prov. Sulsel, menjelaskan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik. Oleh karena itu, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Seksi Pengaduan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sulsel bekerjasama

melakukan survey Kepuasan Masyarakat dengan menggandeng CV.Globalindo ProNetwork yang merupakan unit usaha dari Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Indonesia.

"Survey ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat," Dalam survey yang dilakukan, ada sejumlah variabel yang diukur. Antara lain, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan saran dan masukan hingga sarana dan prasarana.

"Secara umum, rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan di Dinas PMPTSP Prov. Sulsel adalah baik,". Nilai SKM persyaratan pelayanan, menurut kadis DPMPTSP Prov. Sulsel, mendapatkan nilai **3,411.** Persyaratan pelayanan yang didapatkan, sesuai dengan yang diinformasikan, dan tergolong mudah. Sedangkan dimensi prosedur pelayanan, sesuai dengan prosedur yang diinformasikan sebelumnya, dan tergolong sederhana. SKM prosedur pelayanan mendapatkan nilai **3,459**.

"Survey juga menunjukkan bahwa untuk waktu pelayanan tergolong cepat, biaya pelayanan murah (nilai 3,915) , produk pelayanan yang diberikan bermutu tinggi. Selain itu, petugas pelayanan sangat tanggap dan cepat dalam melayani masyarakat (nilai 3,488)". Sekedar informasi, populasi survey ini merupakan masyarakat yang telah menerima layanan administrasi perizinan dan non perizinan pada kantor Dinas PMPTSP Sulsel dalam rentang waktu sejak Januari – Desember 2024. Data populasi yang dikumpulkan 377 orang.

Bila dibandingkan antara capaian realisasi IKM DPMPTSP Kab. Luwu Timur dengan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan maka :

= (IKM. Luwu Timur/ IKM. Prov Sul-Sel) x100%

= (87,86/ 88,30) x100%

= 99,50 %

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

No	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI SAMPAI DENGAN 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risko Terintegrasi Secara Elektronik	340.309.450	332.666.807	7.422.643
2.	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	24.000.000	23.136.000	864.000
Jumlah		364.309.450	355.802.807	8.286.643
Capaian Realisasi Keuangan				97,66 %

Realisasi Keuangan Program Pelayanan Penanaman Modal masih kurang maksimal khususnya untuk Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masih ada beberapa SPJ yang masih sementara proses.

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
TAHUN 2024

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	4	3	3	4	4	3	4	3	4
2	4	3	4	4	3	4	3	3	4
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	3	3	4	4
5	4	3	3	4	3	3	4	4	4
6	3	4	3	4	3	3	4	3	3
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3
8	4	3	3	4	3	3	4	4	4
9	3	3	3	4	4	3	3	3	3
10	3	3	3	4	3	4	3	3	4
11	4	3	3	4	4	4	4	4	4
12	3	3	4	4	3	4	4	4	4
13	3	3	4	4	3	3	4	4	4
14	4	3	3	4	4	3	3	3	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3
16	3	4	4	4	4	4	3	3	4
17	3	3	3	4	3	3	4	4	3
18	4	3	3	4	4	3	3	4	3
19	4	4	3	4	3	3	3	4	3
20	3	3	3	4	3	4	4	3	3
21	4	4	3	4	3	4	3	4	3
22	3	4	4	4	3	4	3	3	3
23	3	3	3	4	3	4	3	4	3
24	4	3	3	4	3	4	3	3	4
25	3	4	3	4	3	4	4	4	3
26	4	4	3	4	3	3	4	3	4
27	3	3	3	4	4	3	4	3	3
28	3	4	3	4	3	3	4	4	3
29	4	4	4	4	3	3	3	3	3
30	3	3	3	4	4	3	4	4	4
31	3	4	3	4	3	3	4	3	4
32	4	3	4	4	3	3	3	3	3
33	3	4	3	4	3	4	3	3	3
34	4	3	3	4	3	3	3	3	3
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4
36	4	3	3	4	3	4	3	4	3
37	3	4	3	4	4	3	3	3	4

38	3	4	3	4	3	3	3	3	4
39	4	3	3	4	3	4	3	3	3
40	4	3	3	4	3	3	4	3	4
41	4	3	4	4	3	3	4	3	3
42	4	4	3	4	3	4	4	4	4
43	4	4	4	4	3	4	3	4	4
44	4	4	4	4	4	3	3	3	4
45	4	4	3	4	3	4	3	4	3
46	4	3	3	4	3	4	3	3	4
47	4	3	4	4	3	4	3	4	3
48	3	4	4	4	4	4	3	3	3
49	3	3	4	4	3	3	3	4	3
50	4	3	4	4	3	3	3	3	4
51	4	4	3	4	3	3	4	4	3
52	3	3	4	4	3	3	3	3	4
53	4	3	4	4	3	3	4	3	4
54	4	4	3	4	3	3	4	4	4
55	4	4	4	4	3	4	3	3	4
56	3	3	3	4	4	4	4	4	4
57	4	4	3	4	4	4	3	3	3
58	3	4	3	4	4	3	3	3	4
59	4	3	3	4	4	3	3	3	3
60	3	3	3	4	4	3	4	3	3
61	3	4	4	4	4	4	3	4	4
62	4	3	4	4	4	4	4	4	3
63	4	4	3	4	4	4	3	4	4
64	4	4	4	4	4	3	4	4	4
65	3	4	3	4	4	4	3	4	4
66	3	4	3	4	4	4	3	3	4
67	3	4	3	4	3	4	4	4	4
68	4	4	4	3	3	3	3	3	4
69	4	4	3	4	3	3	3	3	3
70	3	4	3	4	3	3	4	3	4
71	3	3	4	4	4	3	3	4	3
72	4	3	3	4	3	3	3	3	4
73	3	4	3	4	3	4	3	3	3
74	4	3	4	4	3	4	3	4	3
75	4	3	4	3	3	4	4	3	4
76	3	4	3	4	3	3	3	3	4
77	4	3	4	4	3	3	4	3	4
78	4	3	3	4	4	3	4	3	4
79	3	4	3	4	3	3	3	4	3
80	4	3	4	4	3	3	3	3	4
81	4	4	3	4	3	4	4	3	3
82	4	3	4	4	3	3	4	3	4
83	3	4	3	4	4	4	3	4	4

84	4	3	4	4	4	4	3	3	3
85	3	4	3	4	3	4	3	3	4
86	4	3	3	4	3	3	4	3	4
87	3	4	3	4	3	3	3	3	3
88	3	4	3	4	4	4	3	4	4
89	4	3	3	4	3	3	3	3	4
90	3	3	3	4	4	3	4	3	3
91	3	3	3	4	3	3	3	4	3
92	4	4	4	4	3	4	4	4	4
93	3	4	3	4	3	3	3	3	3
94	3	3	3	4	3	3	3	3	4
95	3	4	4	4	4	4	4	4	4
96	3	3	3	4	3	3	3	3	3
97	3	3	3	4	3	3	3	4	4
98	3	3	3	4	3	3	3	3	3
99	4	3	3	4	3	4	3	4	4
100	4	3	3	4	3	3	3	3	4
101	4	3	3	4	3	4	3	3	3
102	3	3	3	4	3	3	3	3	4
103	3	3	3	4	3	4	3	4	4
104	3	3	3	4	4	4	4	3	4
105	4	4	4	4	4	3	3	3	4
106	4	4	3	4	3	4	3	4	3
107	4	3	3	4	3	4	3	3	4
108	4	3	4	4	3	4	3	4	3
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	3	4	3	4	4	4	4	3	3
111	3	4	3	4	3	3	3	4	4
112	3	3	4	4	3	3	4	3	4
113	3	4	3	4	4	3	3	3	4
114	4	4	3	4	4	4	4	4	4
115	4	3	3	4	3	3	4	3	4
116	4	3	4	4	3	3	4	3	3
117	4	4	3	4	3	4	4	4	4
118	3	3	4	4	3	4	3	4	4
119	4	3	3	4	4	4	4	4	3
120	4	3	4	4	3	4	3	4	4
121	4	3	3	4	3	4	4	4	4
122	3	4	3	4	4	3	3	3	4
123	3	4	3	4	3	3	3	3	4
124	3	3	3	4	3	4	3	3	3
125	3	3	3	4	3	3	3	3	4
126	3	3	4	4	3	3	3	3	3
127	3	4	3	4	3	3	4	4	4
128	3	4	3	4	4	4	3	3	3

129	3	4	3	4	4	3	3	4	4
130	4	4	3	4	4	4	4	4	4
131	4	3	3	4	4	3	4	3	4
132	3	4	3	4	4	3	4	3	3
133	3	4	3	4	3	3	3	4	4
134	4	3	4	4	3	3	4	3	4
135	4	3	4	4	4	4	3	3	4
136	3	4	3	4	4	3	3	4	3
137	3	4	4	4	3	4	4	3	4
138	4	4	3	4	3	4	3	4	4
139	4	3	4	4	3	4	3	4	4
140	4	3	4	4	3	3	4	3	4
141	4	4	4	4	3	4	3	4	4
142	4	3	3	4	3	3	4	3	4
143	4	3	3	4	3	3	4	3	3
144	3	4	3	4	3	4	3	3	4
145	3	3	4	4	4	3	3	4	4
146	4	3	3	4	3	4	3	4	4
147	4	3	4	4	4	4	4	4	4
148	3	4	3	4	3	4	4	3	4
149	4	3	3	4	3	4	4	4	3
150	4	3	4	4	3	4	3	4	4
151	3	3	3	4	3	4	3	4	3
152	3	4	3	4	3	3	4	3	4
153	4	3	4	4	3	3	4	3	4
154	3	3	4	4	3	3	3	4	3
155	4	4	4	3	3	3	3	3	4
156	4	3	3	4	3	3	3	3	3
157	3	3	4	4	3	4	3	4	4
158	4	3	3	4	3	3	3	4	4
159	4	3	4	4	3	3	3	4	3
160	4	3	3	4	3	3	3	4	3
161	3	4	3	4	3	3	4	3	4
162	4	3	4	4	4	3	3	3	3
163	3	4	3	4	3	4	3	3	3
164	3	4	3	4	3	4	4	3	4
165	4	3	3	4	3	4	4	4	3
166	4	3	4	4	3	4	3	4	4
167	4	3	3	4	3	3	4	3	3
168	4	3	3	4	3	3	3	3	4
169	4	3	3	3	3	3	4	4	3
170	4	4	3	4	3	4	3	4	4
171	3	4	3	4	3	3	3	3	3
172	4	3	3	4	3	3	4	3	3
173	3	4	3	4	3	4	3	3	4
174	3	3	4	4	4	3	3	4	4

175	3	4	3	4	3	3	4	4	3
176	3	3	4	4	3	4	3	3	4
177	4	3	4	4	3	3	4	3	4
178	4	4	3	4	3	3	4	4	4
179	3	3	4	4	3	4	4	3	4
180	4	3	4	4	4	3	4	4	4
181	3	4	3	4	4	4	3	3	3
182	3	4	3	4	4	3	3	4	4
183	4	3	4	4	4	4	3	3	4
184	3	3	3	4	3	4	3	4	4
185	3	4	4	4	3	3	3	3	4
186	3	4	3	4	3	4	3	3	4
187	3	3	4	4	3	3	3	3	4
188	4	3	3	4	3	4	3	4	4
189	3	4	3	4	3	3	3	3	3
190	4	3	3	4	3	3	3	3	4
191	3	3	3	4	3	3	3	3	4
192	4	4	4	4	3	4	3	4	4
193	3	3	3	4	4	3	4	3	3
194	3	3	3	4	3	4	3	4	4
195	4	3	3	4	4	4	4	3	4
196	4	3	4	4	4	3	4	3	3
197	4	4	3	4	3	3	3	4	3
198	4	3	3	4	3	4	3	4	4
199	3	4	3	4	3	3	3	3	3
200	4	3	3	4	3	4	4	4	3
201	3	3	3	4	3	3	4	3	4
202	3	4	3	4	3	4	3	3	3
203	4	3	4	4	3	3	4	3	4
204	4	4	4	4	3	4	3	4	3
205	4	3	4	4	4	3	4	4	3
206	3	4	3	4	3	3	4	3	4
207	4	3	3	4	3	4	4	4	3
208	4	3	4	4	3	4	3	4	4
209	3	4	3	4	3	3	3	3	4
210	4	3	3	4	3	4	3	3	4
211	4	3	4	4	3	4	3	4	4
212	3	3	3	4	4	4	4	4	3
213	4	3	4	4	3	3	3	3	4
214	3	3	3	4	3	3	3	3	4
215	3	3	3	4	3	3	4	3	4
216	4	3	4	4	4	3	4	4	4
217	3	4	3	4	4	4	3	3	3
218	3	4	3	4	4	3	3	4	4
219	3	3	3	4	4	4	4	4	3

220	4	3	4	4	3	3	3	4	4
221	3	3	3	4	3	3	4	3	3
222	4	4	4	4	3	4	3	4	4
223	3	4	4	4	3	4	3	4	4
224	3	3	3	4	4	3	4	3	3
225	3	3	3	4	3	4	3	4	4
226	4	3	3	4	4	4	4	3	4
227	4	4	3	4	3	3	3	4	3
228	3	3	4	4	3	4	4	4	3
229	4	4	3	4	3	3	3	3	3
230	3	4	3	4	3	3	4	3	4
231	4	3	4	4	3	3	4	3	4
232	3	3	4	4	3	3	3	4	3
233	4	4	3	3	3	3	3	3	4
234	3	3	3	4	3	3	3	3	3
235	3	3	4	4	3	3	3	4	4
236	4	3	4	4	3	3	4	4	3
237	4	3	3	4	3	3	3	3	4
238	3	4	3	4	3	3	4	4	3
239	3	3	4	4	3	4	3	3	4
240	3	3	4	4	3	3	4	3	3
241	4	3	4	4	4	3	3	4	4
242	3	4	3	4	4	4	3	3	3
243	3	4	3	4	4	3	3	4	4
244	3	4	3	4	4	4	4	2	3
245	3	3	3	4	3	3	3	3	4
246	3	3	3	4	4	4	4	4	3
247	4	3	4	4	3	4	3	4	4
248	3	3	3	4	3	3	4	3	3
249	4	4	4	4	3	4	3	4	4
250	4	4	4	4	4	4	4	4	3
251	4	4	3	4	3	3	3	4	3
252	3	3	4	4	3	4	4	4	4
253	4	4	3	4	3	3	3	3	4
254	3	3	4	4	3	4	3	4	4
255	4	3	4	4	3	3	4	3	4
256	4	3	4	4	4	4	3	3	4
257	3	4	3	4	4	3	3	4	3
258	3	4	4	4	3	4	4	3	4
259	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	4	4	4	4	4	4	4
261	3	3	3	4	3	3	3	3	4
262	3	3	3	4	3	3	4	3	4
263	3	3	3	3	3	3	3	2	4
264	4	4	4	4	4	3	4	4	4
265	3	4	3	4	3	3	4	3	4

266	4	3	3	4	3	3	3	4	3
267	4	3	3	4	3	4	3	3	4
268	3	4	3	4	3	3	4	4	3
269	4	3	3	4	3	4	4	4	4
270	3	3	3	4	3	3	3	3	4
271	4	3	4	4	4	3	3	3	3
272	3	4	3	4	4	3	4	4	4
273	4	3	4	4	3	3	4	3	4
274	3	4	3	4	4	3	4	4	3
275	4	4	4	4	3	3	3	3	3
276	3	3	3	4	3	4	3	4	3
277	4	4	4	4	4	3	3	3	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	3	4	4	3	3	4	4	3
280	3	3	4	4	3	3	3	3	4
281	4	4	3	4	3	4	3	4	3
282	3	4	3	4	3	4	4	4	4
283	4	4	4	3	4	3	3	3	4
284	4	4	3	4	3	3	3	4	3
285	3	4	3	4	4	3	4	3	4
286	4	3	3	4	3	3	4	4	3
287	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	3	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	3	3	4	3	3	3	3	4
290	4	4	3	4	4	3	4	3	3
291	4	4	3	4	3	4	3	4	3
292	4	4	3	4	3	4	3	4	3
293	4	3	4	4	4	4	3	4	3
294	3	4	4	4	4	3	3	3	3
295	4	4	4	4	3	3	4	3	4
296	4	3	4	4	4	3	3	4	4
297	4	3	4	4	4	4	4	4	3
298	3	4	3	4	3	4	3	4	3
299	3	4	3	4	4	3	4	4	3
300	4	4	4	4	3	3	3	4	3
301	3	3	3	4	3	4	3	4	3
302	3	4	4	4	4	3	3	3	4
303	4	3	4	4	3	3	4	3	4
304	4	4	3	4	4	4	3	4	3
305	4	4	3	4	3	3	4	3	3
306	3	3	3	4	4	3	4	4	4
307	3	4	4	4	4	3	3	4	4
308	3	4	3	4	4	4	3	3	3
309	4	4	3	4	4	3	4	4	3
310	4	4	4	4	3	4	4	3	3

311	3	4	4	3	4	4	3	4	4
312	4	3	4	4	3	3	4	4	3
313	4	3	3	4	3	3	3	3	4
314	3	4	3	4	3	3	4	4	3
315	3	3	4	4	3	4	3	3	4
316	4	3	4	4	3	3	4	3	4
317	4	4	4	4	3	3	4	4	4
318	4	4	3	4	3	3	3	3	3
319	3	3	3	4	3	4	3	4	3
320	4	4	3	4	3	3	4	3	4
321	4	3	4	4	3	3	4	3	4
322	4	3	4	4	3	4	3	4	3
323	4	4	4	3	3	3	3	3	4
324	4	3	3	4	3	3	3	3	3
325	3	3	4	4	3	4	3	4	4
326	4	3	3	4	3	3	3	4	4
327	4	4	4	4	3	3	3	4	3
328	4	3	4	4	3	3	3	4	3
329	3	3	4	4	4	3	4	4	3
330	4	3	3	4	3	3	3	3	4
331	3	4	3	4	3	4	3	3	3
332	4	3	4	4	3	4	3	4	3
333	4	3	4	3	3	4	4	4	4
334	3	4	3	4	3	3	3	3	4
335	4	4	4	4	3	3	4	4	4
336	4	3	4	4	4	3	4	3	4
337	4	4	3	4	3	3	4	4	3
338	4	3	4	4	3	4	4	3	4
339	4	3	4	4	3	4	3	4	3
340	3	4	3	4	4	4	3	4	4
341	4	3	4	4	3	3	4	4	3
342	4	3	3	4	4	3	4	3	4
343	3	4	3	4	3	3	4	4	3
344	3	4	4	4	3	4	3	4	4
345	4	3	4	4	3	3	4	4	4
346	4	3	4	4	4	3	3	3	4
347	4	3	3	4	3	4	4	4	4
348	3	4	3	4	4	3	3	3	4
349	4	4	3	4	3	3	4	3	4
350	4	3	3	4	3	4	3	3	3
351	4	4	4	4	3	4	3	4	4
352	4	3	4	4	3	3	4	3	3
353	3	4	3	4	4	4	3	3	3
354	3	4	3	4	4	3	4	4	4
355	4	4	3	4	4	4	4	4	4
356	4	3	4	4	4	4	4	3	4

357	4	4	3	4	4	4	4	3	3	
358	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
359	4	3	4	4	4	3	4	3	4	
360	4	3	4	4	4	4	4	3	4	
361	3	4	3	4	4	3	4	3	3	
362	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
363	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
364	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
365	4	4	3	4	3	4	3	4	3	
366	3	4	4	4	3	4	4	4	4	
367	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
368	4	4	3	4	3	4	4	4	3	
369	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
370	4	3	4	4	3	4	3	4	3	
ΣNilai /Unsur	1315	1278	1256	1470	1226	1272	1269	1286	1331	
NRR / unsur	3,554	3,454	3,395	3,973	3,314	3,438	3,430	3,476	3,597	
NRR tertbg/ unsur	0,395	0,384	0,377	0,441	0,368	0,382	0,381	0,386	0,400	*) 3,514
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										**) **87,86**

DAFTAR KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Tanggal	Nama	Jenis Konsultasi	Tindak Lanjut		Keterangan
1	04 Januari 2024	Arwin Tandi	Tata cara dan persyaratan rencana pembuatan izin untuk toko tani	1.	Melakukan penjelasan terkait persyaratan pembuatan NIB	
2	05 Januari 2024	UMKM Desa Kalosi	Proses Pengurusan PIRT Produk UMKM	1.	Menjelaskan tatacara dan persyaratan yangg harus dilengkapi dalam penerbitan izin termasuk NIB	
3	12 Januari 2024	Andi Esse	Tata cara Pencabutan SIK	1.	Menjelaskan kelengkapan yang harus disiapkan dan membuat surat pencabutan SIK yang akan diteruskan ke Dinas Kesehatan	
4	23 Januari 2024	Denny	Proses penerbitan NIB	1.	Menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi dan melakukan penginputan dan penerbitan NIB	
5	30 Januari 2024	Ulfah	Konsultasi terkait NPWP	1.	Menjelaskan pentingnya NPPWP dalam proses penerbitan NIB	
6	12 Februari 2024	Rahma	Tata cara dan persyaratan rencana pembuatan PBG	1.	Melakukan penjelasan terkait persyaratan pembuatan PBG selanjutnya mengarahkan kepada Dinas PUPR selaku tim teknis.	
7	21 Februari 2024	Sudarmin	Proses pengurusan NIB toko	1,	Menjelaskan tatacara dan persyaratan yang arus dilengkapi dalam penerbitan izin termasuk NIB dan mengarahkan ke Kantor Pajak Pratama untuk mengurus NPWP	
8	28 Februari 2024	Taufik	Tata cara Penerbitan Izin Penelitian	1.	Menjelaskan kelengkapan yang harus disiapkan	
9	04 Maret 2024	Rudi	Tatacara pengurusan Indomaret	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pengurusan Indomaret	

				2.	Mengarahkan ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk konsultasi lebih lanjut.	
10	04 Maret 2024	Amin Madehang	Konsultasi terkait Sertifikat layak yang tidak terverifikasi di Aplikasi OSS	1.	Melakukan penjelasan terkait akun OSS tersebut, dimana untuk menverifikasi bukan kewenangan daerah melainkan kementerian.	
11	06 Maret 2024	Kementerian ATR BPN	Konsultasi terkait PKKPR Non Laut yang ada di Danau Matano	1.	Telah dilakukan pengecekan diwilayah tersebut yang ternyata tidak memiliki PKKPR tetapi telah melakukan pembangunan	
12	13 Maret 2024	Ferry	Konsultasi terkait NIB yang tidak bisa terbit setelah melakukan penambahan KBLI	1	Melakukan penjelasan terkait penerbitan NIB.	
				2	Melakukan persuratan ke kontak BKPM	
13	25 Maret 2024	Sultan	Proses pengurusan NIB Jasa Kontruksi, Pertanian dan Perkebunan	1	Melakukan penjelasan terkait penerbitan NIB.	
14	01 April 2024	dr. Fila	Proses pencabutan SIK	1.	Menjabarkan proses dan kelengkapan berkas yang harus disiapkan	
				2.	Mengarahkan Ke Dinas Kesehatan selaku Tim Teknis setelah terbit permohonan pencabutan	
15	23 April 2024	Rully	Konsultasi terkait Tatacara penerbitan PBG	1	Melakukan penjelasan terkait penerbitan PBG.	
				2	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku Tim teknis	
16	02 Mei 2024	dr. Rahmawati	Proses penerbitan SIK Dokter	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan SIK	
17	07 Mei 2024	Suryadin (PT. PUL)	Pembangunan TPS Limbah B3	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pengurusan Limbah B3	
				2.	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku tim teknis	
18	22 Mei 2024	Arief	Penerbitan izin usaha	1.	Melakukan penjelasan terkait pengurusan NIB	
				2.	Menjelaskan terkait perbedaan penerbitan izin sekarang dengan yang sebelumnya.	
19	03 Juni 2024	Ayub	Proses penerbitan PBG Rumah Tinggal	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan PBG	

				2.	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku tim teknis	
20	06 Juni 2024	Nurul	Proses pendaftaran NIB atas nama perusahaan	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pendaftaran NIB	
				2.	Melakukan pendaftaran NIB	
21	07 Juni 2024	Inti Sari	Proses penerbitan SIK Peraat di Klinik	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pendaftaran SIK Perawat	
				2.	Mengarahkan agar melengkapi semua kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.	
22	20 Juni 2024	Hilman	Proses penerbitan PKWT	1.	Melakukan penjelasan terkait penerbitan PKWT	
				2.	Menjelaskan bahwa saat ini aplikasi sedang mengalami maintenance.	
23	03 Juli 2024		Penerbitan kembali SIK yang hilang	1	Melakukan penjelasan terkait SOP SIK	
				2.	Mengarahkan ke Dinas Kesehatan selaku tim teknis	
24	03 Juli 2024	Adhi	Konsultasi terkait berkas yang harus dilengkapi untuk prngurusan pencabutan SIPA	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pencabutan SIPA dengan melampirkan SIPA asli	
				2.	Mengarahkan ke Dinas Kesehatan selaku tim teknis	
25	10 Juli 2024	PT. Towuti Jaya Husada	Proses pendaftaran NIB yang mengalami kendala dalam pengisisan kolom bagian kabupaten	1	Melakukan penjelasan terkait proses penerbitan NIB	
				2.	Menyampaikan bahwa sudah beberapa hari ini OSS sedang maintenance	
26	03 Agustus 2024		Terkait Kelengkapan berkas SIP Bidan apakah harus meminta surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara penerbitan SIP	
				2.	Mengarahkan untuk melengkapi berkas	
27	07 Agustus 2024	Werni	Konsultasi terkait pengurusan NIB	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara Penerbitan NIB	

				2.	Melakukan pembuatan NIB	
28	12 Agustus 2024	Ningning	Konsultasi terkaitt pengurusan SIK	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pengurusan SIK	
				2.	Mengarahkan untuk melengkapi berkas	
29	23 Agustus 2024	Hartono	Proses pengurusan PBG	1	Melakukan penjelasan terkait proses penerbitan PBG	
				2.	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku tim teknis PBG	
30	17 September 2024	Bumdesa Pelita Mandiri	Proses penerbitan NIB	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan NIB	
				2.	Menbantu melakukan pendaftaran NIB	
31	25 September 2024	PT. PANCA DIGITAL SOLUTION	Proses pendaftaran PKKPR	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pendaftaran PKKPR	
				2.	Membantu melakukan pendaftaran	
32	02 Oktober 2024	PT. Aime Trio Group	Proses menerbitkan KBLI 11051	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan KBLI	
				2.	Mengarahkan ke Dinas Koperindag selaku Tim Teknis	
33	07 Oktober 2024	Miftahul Reskyah	Terkait Kesalahan penulisan tempat kerja di SIK	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pembuatan SIK, dimana DPMPTSP membuat SIK berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Kesehatan	
				2.	Membantu mengkoordinasikan dengan Pihak Tim Teknis	
34	01 November 2024	ADIL	Proses penerbitan NIB Perusahaan	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan NIB	
				2.	Membantu mendaftarkan	
35	04 November 2024	Junita	Proses penerbitan izin Penelitian	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dalam pengurusan izin penelitian	
				2.	Membantu melakukan penerbitan izin	

36	21 November 2024	Nurlela	Terkait penerbitan NIB untuk usaha kelompok	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan NIB	
				2.	Membantu melakukan pendaftaran	
37	04 Desember 2024	Syamsiah	Proses penerbitan Izin Yayasan Sekolah	1	Menjelaskan terkait persyaratan yang harus dilengkapi dalam penerbitan izin	
				2.	Membantu melakukan pendaftaran NIB terlebih dahulu	
				3.	Mengarahkan ke Dinas Pendidikan selaku Tim Teknis.	
38	17 Desember 2024	Nurlian	Proses pembuatan PBG	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dalam pengurusan PBG.	
				2.	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku Tim Teknis	

PROGRAM/ KEGIATAN							SUB KEGIATAN							KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	%	TW I	25	21,34	85,36								
			TW II	25	10,00	40,00								
			TW III	25	24	96,00								
			TW IV	25	23,5	94,00								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang di tatausahakan	%	TW I	25	25,00	100,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	25,00	100,00				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25	25	100,00				TW III	1	1	100,00	
			TW IV	25	25	100				TW IV	1	1	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	TW I	25	25,00	100,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	Dok	TW I	3	3	100,00	
			TW II	25	25,00	100,00				TW II	3	3	100,00	
			TW III	25	25	100,00				TW III	3	3	100,00	
			TW IV	25	25	100				TW IV	3	3	100,00	

							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Org	TW I	3	3	100,00	
										TW II	4	7	175,00	
										TW III	4	4	100,00	
										TW IV	2	2	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	TW I	25	25,00	100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	25,00	100,00				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25	25	100,00				TW III	1	1	100,00	
			TW IV	25	25	100				TW IV	1	1	100,00	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	TW I	1	1	100,00	
										TW II	2	1	50,00	
										TW III	0	0	0,00	
										TW IV	0	0	0,00	
							Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah barang cetakan dan penggandaa	Paket	TW I	1	1	100,00	
										TW II	1	1	100,00	

						Pengganda an	n yang disediakan		TW III	1	1	100,00	
									TW IV	0	0	0,00	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Eksemplar	TW I	15	15	100,00	
									TW II	15	15	100,00	
									TW III	15	15	100,00	
									TW IV	15	15	100,00	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjunganny a	Laporan	TW I	3	3	100,00	
									TW II	3	3	100,00	
									TW III	3	3	100,00	
									TW IV	3			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	TW I	60	35	58,33	
									TW II	90	75	83,33	
									TW III	80	150	187,50	
									TW IV	44	44	100,00	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0,00	
			TW II	100	0	0,00				TW II	1	0	0,00	
			TW III	0	0	0				TW III	0	0	0,00	
			TW IV	0	0	0				TW IV	0	0	0,00	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0,00	
										TW II	0	0	0,00	
										TW III	0	0	0,00	
										TW IV	3	2	66,67	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	TW I	25	25	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	25	100				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25						TW III	1	1	100,00	
			TW IV	25						TW IV	1	1	100	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi,	Laporan	TW I	9	9	100,00	
										TW II	9	9	100,00	

							Daya Air, dan Listrik	SDA dan listrik yang terbayarkan		TW III	9	9	100,00	
										TW IV	9	9	100,00	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	Org	TW I	5	5	100,00	
										TW II	5	5	100,00	
										TW III	5	5	100,00	
										TW IV	5	5	100,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	TW I	6	6	100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	TW I	1	1	100,00	
			TW II	13	11	84,62				TW II	2	2	100,00	
			TW III	26						TW III	6	3	50	
			TW IV	13						TW IV	1	1	100	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	TW I	5	5	100,00	
										TW II	10	9	90,00	
										TW III	20	15	75,00	

										TW IV	12	12	100,00	
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	TW I	0	0	0,00	
										TW II	1	0	0,00	
										TW III	0	0	0,00	
										TW IV	0	0	0,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	TW I	25	25	100,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Org	TW I	20	20	100,00	
			TW II	25	25	100,00				TW II	20	20	100,00	
			TW III	25	25	100,00				TW III	20	20	100,00	
			TW IV	25						TW IV	20	20	100,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	4	4	100,00	
										TW II	4	4	100,00	
										TW III	4	4	100,00	
										TW IV	6	6	100	
Perencanaan, Penganggaran	Jumlah dokumen	Dok	TW I	3	3	100,00	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen	Dok	TW I	0	0	0	

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		TW II	5	5	100,00	Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan yang disusun tepat waktu		TW II	1	1	100,00	
			TW III	7	7	100,00				TW III	1	1	100,00	
			TW IV	2						TW IV	0	0	0	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	0	0	0	
										TW II	1	1	100,00	
										TW III	1	1	100,00	
										TW IV	0	0	0	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100,00	
										TW II	0	0	0	
										TW III	1	1	100,00	
										TW IV	0	0	0	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat	Dok	TW I	2	2	100	
										TW II	2	2	100	

							daerah yang disusun tepat waktu		TW III	4	4	100	
									TW IV	3	3	100	

1. Perbandingan kondisi Target Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 2024

➢ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah ***"Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus".***

Target Indikator sasaran penunjang pada TA. 2024 adalah 96% dan realisasi 98,90% dengan persentase capaian kinerja 103,02%. Persentase capaian kinerja melebihi dari target karena beberapa kegiatan yang mendukung capaian program, realisasinya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

➢ Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraht
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDr
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya penyesuaian penggunaan aplikasi SIPD untuk penatausahaan keuangan yang berpengaruh terdapat penyerapan anggaran
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Keterlambatan penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Adanya sitem belanja barang makan minum dan Alat tulis kantor menggunakan belanja e-katalog di ULP.
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Untuk segera melakukan penatausahaan keuangan bilamana aplikasi telah siap digunakan
- Untuk segera menetapkan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa

- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPMPTSP, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

➢ **Efisiensi Sumber Daya**

- Tidak adanya tenaga ASN pada jabatan pelaksana yang dapat membantu pejabat struktural sehingga untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

➢ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	96%	96%	100%	5.909.121.498,-	5.307.027.522,-	89,81%

Tabel. 30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96 %	89,81%	6,19 %

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 96,00% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,81 %, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 6,19 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%\right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi TA. 2024 dengan Tahun sebelumnya (2023)

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 31
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah						**Target Tahun 2024**
Indikator Kinerja Sasaran	TA. 2024			TA. 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96 %	98,90 %	103,02 %	95 %	97,63 %	102,76 %	100%

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan TA. 2023 yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Capaian kinerja beberapa sub kegiatan melebihi dari target yang direncanakan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara periodik.
3. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 32
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	**Realisasi**			
	Tahun 2024	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2024		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,90%	98,90%	100%	98,90%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 33
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target s.d Tahun 2024	Realisasi TW III	Capaian
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	96%	96%	98,90%	103,02%

1.	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	87,50%	87,50%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	20 Org	20 Org	20 Org	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%	100%

a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Org	16 Org	17 Org	113,33%
b.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	95,00%	95,00%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	150 Org	150 Org	130 Org	86,66%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	450 Kali	450 Kali	450 Kali	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	0%	0%	0%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%

		kebutuhan kantor	diadakan				
b.	Pengadaan Mebel	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	94,72%	94,72%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	1000 Surat	1297 Surat	198 Surat	129,7%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	60 Rek	60 Rek	60 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Org	4 Org	4 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	47 Unit	47 Unit	100%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (outcome)**

Grafik.
Perbandingan Target dan realisasi TA. 2024

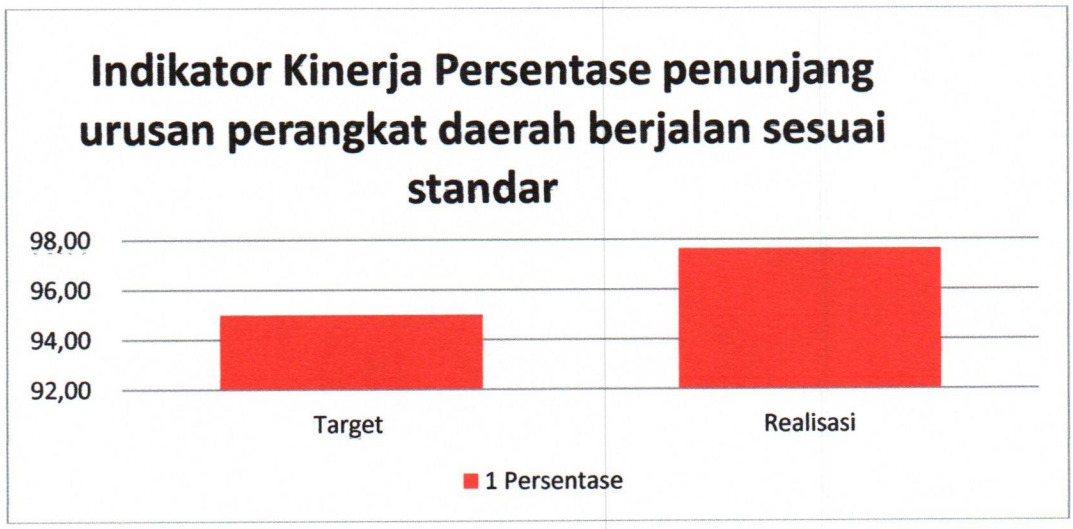

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan ***formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus***. Target 96% dan realisasi 98,90% dengan capaian kinerja 103,02%, dan menyerap anggaran sebesar 92,68%. Capain kinerja program yang melebihi target karena beberapa kegiatan capaiannya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 96,4% dengan persentase capaian kinerja 95%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 90%, yang diakibatkan adanya jabatan Pelaksana (Pejabat Pemeriksa Keuangan) yang belum terisi. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 20 org dan realisasi 20 org dengan persentase capaian kinerja 100 %.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, target pada TA. 2024 sebanyak 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen (100%) yaitu Laporan Keuangan Tahun 2024 2 dok, Laporan Triwulanan 4 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok.

3. Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target pada TA. 2024 sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.416.150, terealisasi sebesar Rp. 16.824.600 atau sebesar 96,60%.

4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target pada TA. 2024 sebanyak 15 org dan realisasi 17 orang (113,33%) yaitu Bimtek anggaran 1 orang, Bimtek LKPJ/LPPD 1 orang, Bimtek Arsip 3 orang. Penggunaan angaran BIMTEK disesuaikan undangan pemanggilan peserta. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.620.000, Realisasi keuangan sebesar Rp 17.620.000,- atau sebesar 98,30%.

5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 95,00% dengan persentase capaian kinerja 98,00%. Capaian kinerja kurang dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terealisasi. Dan disediakan anggaran sebesar Rp Rp 458.512.700,- terealisasi sebesar Rp 450.831.544,- atau sebesar 98,32%.

6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Dan berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan dilkakukan pada TA. 2024. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel** tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga belanja modal ditunda untuk direalisasikan.
- **Sub kegiatan Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor** tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga belanja modal ditunda untuk direalisasikan.

- **Sub kegiatan Pengadaaan Peralatan dan Mesin** tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga belanja modal ditunda untuk direalisasikan.

7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target TA. 2024 sebanyak 1000 surat dan terealisasi 1.297 surat dengan persentase capaian kinerja 129%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target pada TA. 2024 sebanyak 60 rekening dan realisasi 60 rekening, terdiri dari Listrik DPMPTSP 12 rek, rek Air kantor 12 rek, kartu halo 12 rek, TV Kabel 12 bulan dengan persentase capaian kinerja 100%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 4 orang setiap triwulan dan realisasi 4 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan tenaga security.

8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena terdapat beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran

pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar sebesar **Rp. 5.909.121.498,-** *(Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Satu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah),* terdiri dari belanja pegawai **Rp 3.063.934.883,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.804.186.615**,- dan belanja modal **Rp 41.000.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program, 13 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Adapun target anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 30. Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2024 dan TA. 2023

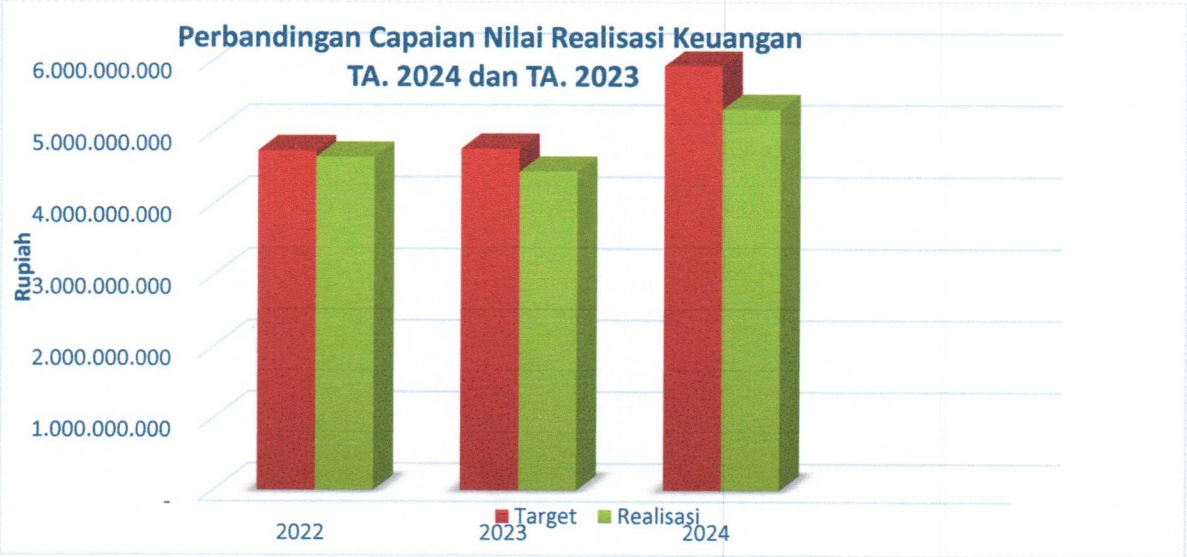

Tabel. 34
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			Permasalahan/ Kendala	Solusi
		PAGU (RP)	Realisasi Anggaran	(%)		
1	2	3	4	5	13	14
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.032.749.378,00**	**3.737.368.865,00**	**92,68**		
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**82.865.350,00**	**75.663.168,00**	**91,31**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.050.500,00	33.475.000,00	85,72	Gaji upahjasa 1 org yg mengundurkan diri	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.379.000,00	3.115.100,00	92,19		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.907.650,00	3.582.735,00	91,69		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.528.200,00	35.490.333,00	97,16		
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.122.261.823,00**	**2.919.768.481,00**	**93,51**		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.016.534.883,00	2.815.226.981,00	93,33	Ada 1 jabatan Kosong dan 1 ASN Pindah Masuk dari Luwu Utara, tetapi belum bisa dibayarkan TPP sebelum mengabdi 1 tahun.	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	105.726.940,00	104.541.500,00	98,88		
03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.416.150,00**	**16.824.600,00**	**96,60**		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.416.150,00	16.824.600,00	96,60		
04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**122.414.000,00**	**92.202.900,00**	**75,32**		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.874.000,00	22.412.400,00	97,98		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	99.540.000,00	69.790.500,00	70,11	Terdapat sisa Anggaran dari Belanja Kontribusi Bimtek	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**455.455.085,00**	**423.995.356,00**	**93,09**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.885.700,00	4.883.000,00	99,94		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	25.500.000,00	0,00	0,00	Rasionalisasi anggaran dan ketidakresponsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.648.385,00	5.893.950,00	77,06	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Mengunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.660.000,00	8.581.000,00	80,50	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Mengunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.040.000,00	8.040.000,00	100,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.800.000,00	10.260.000,00	95,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.921.000,00	386.337.406,00	99,59		
06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.500.000,00**	**3.000.000,00**	**19,35**		
	Pengadaan mebel	9.000.000,00	0,00	0,00	Dipending untuk Rasionalisasi	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.500.000,00	3.000.000,00	46,15	Dipending untuk Rasionalisasi	
07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.586.970,00**	**129.808.330,00**	**97,17**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.178.970,00	20.770.830,00	93,65		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.608.000,00	33.887.500,00	97,92		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.800.000,00	75.150.000,00	97,85		
08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.250.000,00**	**76.106.030,00**	**91,42**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	40.451.030,00	88,61		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.600.000,00	22.600.000,00	100,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	13.055.000,00	87,03	Sisa Penawaran belanja barang	
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**297.398.700,00**	**288.528.507,00**	**97,02**		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**82.399.000,00**	**74.392.307,00**	**90,28**		
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	**82.399.000,00**	74.392.307,00	90,28		

	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	**214.999.700,00**	**214.136.200,00**	**99,60**		
1.	Penyusunan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	214.999.700,00	214.136.200,00	99,60		
C.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**742.131.970,00**	**505.762.053,00**	**68,15**		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**742.131.970,00**	**505.762.053,00**	**68,15**		
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	181.377.870,00	180.632.278,00	99,59		
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	560.754.100,00	325.129.775,00	57,98	Kegiatan Temu Bisnis di Surabaya Dipending untuk Rasionalisasi 200juta dan perjalanan dinas 30 Juta (Total 230 juta)	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
D.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**340.309.450,00**	**332.866.807,00**	**97,81**		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**340.309.450,00**	**332.866.807,00**	**97,81**		
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	319.727.100,00	313.205.517,00	97,96		
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.582.350,00	19.661.290,00	95,53		
E.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**472.532.000,00**	**419.365.290,00**	**88,75**		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**472.532.000,00**	**419.365.290,00**	**88,75**		
1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	61.719.000,00	37.786.300,00	61,22	Adanya rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan dikhawatirkan akan menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat keterlambatan dana transfer	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.	Bimbingan Teknis Teknis Kepada Pelaku Usaha	226.305.000,00	223.738.510,00	98,87		
3.	Pengawasan Penanaman Modal	184.508.000,00	157.840.480,00	85,55		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
F.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**24.000.000,00**	**23.136.000,00**	**96,40**		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**24.000.000,00**	**23.136.000,00**	**96,40**		
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	24.000.000,00	23.136.000,00	96,40		
	TOTAL BELANJA	**5.909.121.498,00**	**5.307.027.522,00**	**89,81**		

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
					I		II		III		IV					
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Semua Bidang															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	4.032.749.378		406.731.350		1.362.233.428		859.311.965		1.109.092.122	95	3.737.368.865	95,00%	92,68%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	82.865.350	-	9.030.000	-	16.750.700	-	19.820.835	100	30.061.633	100	75.663.168	100,00%	91,31%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	2	39.050.500	-	4.860.000	1	8.210.000	1	7.000.000	-	13.405.000	2	33.475.000	100,00%	85,72%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.379.000	-	-	1	-	1	-	-	3.115.100	2	3.115.100	100,00%	92,19%

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.907.650	-	-	1	1.571.200	1	2.011.535	-	-	2	3.582.735	100,00%	91,69%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	36.528.200	2	4.170.000	2	6.969.500	2	10.809.300	4	13.541.533	10	35.490.333	100,00%	97,16%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	3.122.261.823	-	302.918.419	-	1.180.795.239	-	588.124.812	100	847.930.011	100	2.919.768.481	100,00%	93,51%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	3.016.534.883	20	296.749.419	20	1.131.594.639	20	567.806.512	20	819.076.411	20	2.815.226.981	100,00%	93,33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	105.726.940	4	6.169.000	4	49.200.600	4	20.318.300	6	28.853.600	18	104.541.500	100,00%	98,88%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	17.416.150	-	-	-	9.378.500	-	3.646.100	100	3.800.000	100	16.824.600	100,00%	96,60%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	17.416.150	1	-	1	9.378.500	1	3.646.100	1	3.800.000	4	16.824.600	100,00%	96,60%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan (%)	100	122.414.000	-	5.038.000	-	9.503.000	-	44.282.500	100	33.379.400	100	92.202.900	100,00%	75,32%

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	22.874.000	1	-	1	1.400.000	1	8.491.000	1	12.521.400	4	22.412.400	100,00%	97,98%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	13	99.540.000	3	5.038.000	7	8.103.000	4	35.791.500	2	20.858.000	16	69.790.500	100,00%	70,11%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang penuhi (%)	100	455.455.085	-	64.005.500	-	96.880.000	-	138.410.096	-	124.699.760	-	423.995.356	0,00%	93,09%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4.885.700	1	-	1	2.452.000	1	-	1	2.431.000	4	4.883.000	100,00%	99,94%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	25.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	7.648.385	1	-	1	2.702.000	1	526.500	-	2.665.450	3	5.893.950	100,00%	77,06%

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	3	10.660.000	1	-	1	3.395.000	1	1.270.000	-	3.916.000	3	8.581.000	100,00%	80,50%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	8.040.000	15	1.710.000	15	2.310.000	15	1.910.000	15	2.110.000	60	8.040.000	100,00%	100,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.800.000	2	-	2	3.150.000	4	3.600.000	4	3.510.000	12	10.260.000	100,00%	95,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	270	387.921.000	35	62.295.500	75	82.871.000	150	131.103.596	44	110.067.310	304	386.337.406	100,00%	99,59%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemrintah Daerah yang diadakan (%)	100	15.500.000	-	-	-	-	-	-	10	3.000.000	10	3.000.000	10,00%	19,35%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	6.500.000	-	-	-	-	-	-	2	3.000.000	2	3.000.000	66,67%	46,15%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (%)	100	133.586.970	-	25.739.431	-	30.982.459	-	29.269.622	100	43.816.818	100	129.808.330	100,00%	97,17%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	22.178.970	1	3.000.000	1	6.253.500	1	6.837.330	1	4.680.000	4	20.770.830	100,00%	93,65%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	34.608.000	3	4.739.431	3	6.728.959	3	8.882.292	3	13.536.818	12	33.887.500	100,00%	97,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	76.800.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	13.550.000	1	25.600.000	4	75.150.000	100,00%	97,85%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	83.250.000	-	-	-	17.943.530	-	35.758.000	10	22.404.500	10	76.106.030	10,00%	91,42%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	45.650.000	1	-	2	11.763.530	2	19.073.000	4	9.614.500	9	40.451.030	100,00%	88,61%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	22.600.000	5	-	10	6.180.000	10	3.630.000	22	12.790.000	47	22.600.000	100,00%	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000	-	-	-	-	1	13.055.000	-	-	1	13.055.000	100,00%	87,03%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,09%	92,68%
					Predikat Kinerja										Sangat	Sangat

															Tinggi	Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional (Angka)	45	297.398.700		4.460.000		12.081.500		44.331.000		227.656.007	176	288.528.507	391,11%	97,02%
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi (%)	100	82.399.000	-	4.460.000	-	5.725.000	-	41.861.300	-	22.346.007	-	74.392.307	0,00%	90,28%
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2	82.399.000	-	4.460.000	1	5.725.000	1	41.861.300	-	22.346.007	2	74.392.307	100,00%	90,28%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase jenis potensi yang disusun dalam Peta Potensi kabupaten (%) (%)	100	214.999.700	-	-	-	6.356.500	-	2.469.700	-	205.310.000	-	214.136.200	0,00%	99,60%
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	214.999.700	-	-	-	6.356.500	-	2.469.700	1	205.310.000	1	214.136.200	100,00%	99,60%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,02%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rupiah)	3,8E+12	742.131.970		116.000.000		122.726.475		60.250.100		206.785.478	######	505.762.053	87,56%	68,15%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan (MoU)	7	742.131.970	-	116.000.000	-	122.726.475	-	60.250.100	2	206.785.478	2	505.762.053	28,57%	68,15%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	560.754.100	1	116.000.000	1	120.611.475	-	59.432.600	-	29.085.700	2	325.129.775	66,67%	57,98%

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	3	181.377.870	-	-	1	2.115.000	1	817.500	1	177.699.778	3	180.632.278	100,00%	99,59%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	74,81%	68,15%
														Predikat Kinerja	Sedang	Sedang
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP (Persen)	95	340.309.450		63.200.700		51.000.600		104.617.500		114.048.007	99	332.866.807	104,67%	97,81%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu (%)	100	340.309.450	-	63.200.700	-	51.000.600	-	104.617.500	-	114.048.007	-	332.866.807	0,00%	97,81%
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	6000	319.727.100	1.559	63.200.700	1.906	48.780.600	1.922	95.882.000	1.790	105.342.217	7.177	313.205.517	100,00%	97,96%
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25	20.582.350	13	-	9	2.220.000	9	8.735.500	3	8.705.790	34	19.661.290	100,00%	95,53%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	97,81%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Persen)	85	472.532.000		43.250.000		75.043.700		127.136.430		173.935.160	65	419.365.290	76,71%	88,75%

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang Menyampaikan LKPM (%)	90	472.532.000	-	43.250.000	-	75.043.700	-	127.136.430	-	173.935.160	-	419.365.290	0,00%	88,75%
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	9	61.719.000	2	3.927.000	3	1.150.000	2	7.347.730	2	25.361.570	9	37.786.300	100,00%	61,22%
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	244	226.305.000	-	-	86	50.900.000	60	91.347.100	60	81.491.410	206	223.738.510	84,43%	98,87%
	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	15	184.508.000	1	39.323.000	4	22.993.700	3	28.441.600	6	67.082.180	14	157.840.480	93,33%	85,55%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	89,94%	88,75%
														Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Base yang Valid (Dokumen)	1	24.000.000		1.970.000		7.297.000		8.015.000		5.854.000	1	23.136.000	100,00%	96,40%

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola (%)	100	24.000.000	-	1.970.000	-	7.297.000	-	8.015.000	-	5.854.000	-	23.136.000	0,00%	96,40%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2	24.000.000	-	1.970.000	1	7.297.000	-	8.015.000	1	5.854.000	2	23.136.000	100,00%	96,40%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,40%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				5.909.121.498	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**95,41%**	**89,81%**
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**

Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi Kinerja Tahun 2023 di tuangkan dalam matris tindak lanjut sebagai berikut:

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
1.	Lampirkan jadwal monitoring dan evaluasi khususnya pada rencana aksi kinerja	Telah melakukan perbaikan dan melengkapi perencanaan kinerja dengan jadwal monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pada KAK/TOR Sub kegiatan	Telah melakukan perbaikan pada KAK.
2.	Agar melakukan koordinasi dengan opd yang menangani perencanaan agar mengkoordinir penyusunan dokumen teknis perencanaan, pedoman teknis pengukuran kinerja, sop pengumpulan data kinerja agar seragam di setiap OPD	Telah melakukan koordinasi secara lisan dengan Bapelitbangda dalam hal penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pedoman teknis pengukuran kinerja dan sop pengumpulan data kinerja dan Bapelitbangda akan mengkoordinir penyusunan pedoman tersebut dengan melakukan pertemuan untuk semua OPD	Telah dikoordinasikan
3.	Agar perencanaa kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan program yang dilaksanakan oleh OPD lain yang dapat membantu tercapainya sasaran DPMPTSP (Crosscutting)	Telah melakukan perbaikan dan melengkapi Penyusunan Crosscutting dengan OPD lain	Telah melakukan perbaikan Crosscutting.
4.	Dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang agar kepala OPD memerintahkan semua unit kerja (eselon III, IV, Fungsional dan staf) untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja (PK/SKP) yeang telaah diperjanjikan	Telah menyusun SKP sesuai dengan PK	Telah dibuat dan dicantumkan SKP sesuai dengan PK
5.	Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan)	Terkait pemberian reward and Punishment), tunjangan kinerja dan penempatan/penghapusan jabatan,	Pemberian penghargaan (reward) hanya sebatas ucapan belum berbentuk

	tunjangan kinerja/penghasilan, menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional, dan mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi.	untuk saat ini masih berdasarkan presensi, belum ada tindak lanjut dalam bentuk lainnya.	tulis atau lainnya
6.	Publikasi Dokumen laporan kinerja tahun 2023 tepat waktu baik di website OPD dan PPID	Telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja	Di website OPD dan PPID
7.	Sosialisasikan informasi dalam dokumen laporan kinerja kepada seluruh unit kerja dibawahnya agar digunakan dalam aktivitas mencapai kinerja	Telah mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja	Informasi capaian kinerja telah disampaikan pada setiap rapat internal

BAB IV

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis 1 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 Realisasi Investasi sebesar **Rp 3.327.337.640.056,-** atau sebesar **144,67%**, dan sasaran strategis 2 Rata-rata Waktu penyelesaian Perizinan Usaha **99,40 %**.

b. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :
   - Telah melakukan koordinasi secara lisan dengan Bapelitbangda dalam hal penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pedoman teknis pengukuran kinerja dan sop pengumpulan data kinerja dan Bapelitbangda akan mengkoordinir penyusunan pedoman tersebut dengan melakukan pertemuan untuk semua OPD.
   - Telah melakukan perbaikan dan melengkapi perencanaan kinerja dengan jadwal monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pada KAK/TOR Sub kegiatan.
   - Terkait pemberian reward and Punishment, untuk saat ini masih berdasarkan presensi, belum ada tindak lanjut dalam bentuk lainnya.
   - Telah dilakukan pencantuman rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya.
   - Telah melakukan Evaluasi Internal dengan menggunakan aplikasi dapat dilihat pada aplikasi Sipengendali Pede dan E-Sakip Luwu Timur.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi DPMPTSP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 25 Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si
NIP. 19690126 199803 1 004
Pangkat: \Pembina Tk.I/ IV-b